



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN KODE KLASIFIKASI KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyusun pedoman kode klasifikasi kearsipan di lingkungan pemerintah kabupaten Barito Utara
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Pedoman Kode Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rincian Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota;
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Sistem Pembuatan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;

14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor);
15. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan Pada Lembaga Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor);
16. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 24 Tahun 2012 tentang Materi Muatan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
17. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 31 Tahun 2012 tentang Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 250);
18. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara. (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KODE KLASIFIKASI KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

5. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
8. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas arsip.
9. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara.

BAB II KODE KLASIFIKASI

Pasal 2

- (1) Dalam penyelenggaraan kearsipan di Daerah, pencipta arsip menggunakan kode klasifikasi dengan berdasarkan angka/numeric.
- (2) Kode klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 3

PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kearsipan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan kearsipan di Daerah.

BAB IV PEMBIAYAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul dalam penyelenggaraan kearsipan di daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 2 Januari 2019



Diundangkan di MuaraTeweh
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2019 NOMOR...8

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


FAKHRI FAUZI
NIP. 19710921 199803 1 004

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN KODE KLASIFIKASI
KEARSIPAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO UTARA

KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

KODE	KLASIFIKASI
000	UMUM
001	Lambang
001.1	Garuda
001.2	Bendera Kebangsaan
001.3	Daerah (Provinsi / Kabupaten / Kota)
002	Tanda Kehormatan / Penghargaan (untuk pegawai lihat 861 - 1)
002.1	Bintang
002.2	Satya lencana
002.3	Satya karya Nugraha
002.4	Monumen
002.5	Penghargaan Secara Adat
002.6	Penghargaan Lainnya (Cinderamata)
003	Hari Raya / Besar
003.1	Nasional
003.2	Keagamaan
003.3	Hari Ulang Tahun (HUT)
004	Ucapan
004.1	Terima Kasih
004.2	Selamat
004.3	Mohon Diri
004.4	Bela Sungkawa
004.5	Ucapan Lainnya
005	Undangan
006	Tanda Jabatan
006.1	Pamong Praja
006.2	Pejabat Lainnya
007	Tanda Gambar Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Pemerintah
008	-
009	-
010	URUSAN DALAM
011	Gudang Kantor
011.1	Instalasi Listrik
011.2	Otomasi
011.3	Air Minum
011.4	Telepon
011.5	Hidrant
011.6	Alarm
011.7	Internet
012	Rumah Dinas
012.1	Tanah Untuk Rumah Dinas
012.2	Perabotan

012.2	Perabotan
013	Akomodasi
013.1	Mess
013.2	Wisma
013.3	Hotel
013.4	Villa
013.5	Persinggahan Lainnya
014	Rumah Susun
015	Peminjaman Saran Prasarana kantor (ruangan, gedung, kendaraan, LCD, laptop, dll)
016	Pengurusan Kendaraan Dinas
017	Keamanan / Tata Tertib Kantor
018	Kebersihan Kantor
019	Protokol
019.1	Upacara / Apel Bendera / Upacara Lainnya
019.2	Tata Tempat (pemasangan gambar Presiden/Wapres dan Pejabat Pemerintah)
019.3	Audiensi
019.4	Penerimaan Tamu
019.5	Kerjasama
019.6	Alamat Kantor dan Pejabat
019.7	Spanduk, Baliho, Banner, Umbul-umbul dll
020	PERALATAN (BARANG DAN JASA)
020.1	Penawaran
021	Alat tulis
021.1	Penawaran Barang
021.2	Penawaran Jassa
022	Barang
022.1	Barang Bergerak
022.2	Barang Tidak Bergerak
023	Jasa
024	-
025	-
026	-
027	Pengadaan
027.1	Prakualifikasi
027.2	Amandemen / Teguran
027.3	SPMK
027.4	Lelang Umum
027.5	Pemeriksaan Pekerjaan
027.6	Perpanjangan Waktu
027.8	Sanggahan
027.9	Pemeliharaan Barang/Jasa
028	Inventaris
028.1	Pendataan Barang Milik Negara
028.2	Pemeliharaan Barang Milik Negara
028.3	Penghapusan Barang Milik Negara
029	-
030	KEKAYAAN DAERAH
031	Barang-barang Tidak Bergerak (tanah, kebun, dll)
032	Barang-barang Tidak Bergerak (gedung, asrama, dll)

033	Tanaman
034	Alat – alat Besar
035	Hewan
036	Barang Persediaan Dalam Gudang
037	Alat Pengangkut (darat, laut, udara)
038	Peralatan Kantor / Pabrik
039	Peralatan Rumah Sakit
040	PERPUSTAKAAN/DOKUMEN/KEARSIPAN/SANDI
041	Perpustakaan
041.1	Pameran Bahan Perpustakaan
041.2	Pengolahan (katalog, Bibliografi, dll)
041.3	Sirkulasi/Layanan
041.3.1	Keanggotaan
041.3.2	Peminjaman dan Pengembalian
041.4	Deposit
041.5	Pemeliharaan, Pelestarian
041.6	Pembinaan Perpustakaan
041.6.1	Bantuan Buku, Rak
041.7	Penghapusan / Penyusutan Bahan Perpustakaan
041.8	Jenis-jenis Perpustakaan
041.9	Kerjasama Antar Perpustakaan
042	Dokumentasi
043	-
044	-
045	Kearsipan
045.1	Pola Klasifikasi
045.2	Akuisisi Arsip
045.3	Penyusutan Arsip
045.3.1	Jadwal Retensi Arsip
045.3.2	Penilaian Arsip
045.3.3	Pemindahan Arsip
045.3.4	Penyerahan Arsip
045.3.5	Pemusnahan Arsip
045.4	Pembinaan Kearsipan
045.4.1	Pengawasan
045.4.2	Bimbingan Kearsipan
045.5	Pemeliharaan, Pelestarian
045.5.1	Fumigasi
045.5.2	Laminasi
045.5.3	Alih Media
045.6	Layanan
045.7	Pemasyarakatan
045.7.1	Pameran
045.7.2	Penerbitan Naskah Sumber Arsip
045.7.3	Sosialisasi Kearsipan
045.8	Pengembangan Sistem
045.8.1	Sistem Kearsipan
045.8.2	Sistem Jaringan Informasi Kearsipan
045.9	Konservasi
046	Sandi
047	Telegram, Telex, Radio, ISB

048	Data Elektronik
049	-
050	PERENCANAAN
	Meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Klasifikasikan disini proyek-proyek pembangunan, RKP, RKPD, RKA, DPA, Laporan Fisik Keuangan Kegiatan Pembangunan, Musrenbang Pusat, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Desa.
050.1	RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)
050.1.1	RENSTRA (Rencana Strategi)
050.1.2	RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
050.1.3	RENSTRA BAPPEDA
050.2	Program nasional
050.2.1	RKP (Rencana Kerja Pembangunan)
050.2.2	RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga)
050.2.3	RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)
050.2.5	KUA (Kebijakan Umum Anggaran), KUPA (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran), PPAS (Penetapan Plafon Anggaran Sementara)
050.2.6	Jawaban Gubernur Atas Pandangan Fraksi
050.2.7	Nota Keuangan
050.2.8	RKT (Rencana Kerja Tahunan)
050.2.9	RKO (Rencana Kerja Operasional)
051	Laporan
051.1	Laporan Berkala
051.2	LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
052	Evaluasi
052.1	Evaluasi Rencana Strategis
052.1.1	Evaluasi Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah
052.1.2	Evaluasi Kerja Pemerintah Daerah
052.1.3	Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten / Kota
060	ORGANISASI / KETATALAKSANAAN
061	Organisasi
061.1	Susunan dan Tata Kerja (SOT)
061.2	Tata Tertib Kantor, jam kerja
061.3	Evaluasi Kelembagaan
062	Organisasi Badan non Pemerintah
063	Organisasi Badan International
064	Organisasi Semi Pemerintah BKS-AKSI
065	Ketatalaksanaan
065.1	Tata Naskah Dinas
065.2	Stempel
065.2.1	Stempel Jabatan
065.2.2	Stempel Dinas
065.3	Papan Nama Instansi Pemerintah/non Pemerintah
065.4	Ketentuan Pakaian Dinas dan Atribut

066	Tata Hubungan Kerja
067	Sistem dan Prosedur
067.1	Standar Operasional Prosedur Pelayanan
067.2	Standar Operasional Prosedur Kerja
068	Evaluasi dan Pelaporan Ketatalaksanaan
069	Analisis Jabatan
069.1	Analisis Jabatan dan Pengukuran Beban kerja
069.2	Uraian Jabatan
070	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
071	Riset
072	Pengembangan
072.1	KRENOVA (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat)
072.2	SINAS (Sistem Inovasi Nasional)
072.3	SIDA (Sistem Inovasi Daerah), meliputi cluster, kabupaten/kota, desa inovatif
072.4	Inkubator Teknologi dan Bisnis
072.5	Pameran Produk inovasi/Ristek
072.6	BTC (Bisnis Teknologi Center)
072.7	Raptek (Penerapan Iptek)
072.8	HKI (Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual)
073	Kajian
073.1	Kajian Strategis
073.2	Seminar
073.3	Workshop
073.4	Rapat Teknis/Rapat Koordinasi
073.5	Lokakarya
073.6	Diseminasi/Sosialisasi hasil Penelitian
074	Kerjasama Penelitian
074.1	Instansi Pemerintah Daerah/Pusat
074.2	Perguruan Tinggi Negeri/Swasta
074.3	Lembaga Swasta Nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat
074.4	Lembaga Internasional
075	Perekayasa
076	Jaringan Penelitian dan Pengembangan
077	Publikasi Ilmiah
077.1.1	Jurnal Ilmiah
080	KONPERENSI/RAPAT KOORDINASI
081	Gubernur
082	Bupati/Walikota
083	Komponen, Eselon Lainnya
084	Instansi lainnya
085	International di Dalam Negeri
086	International di Luar Negeri
087	-
088	-
089	-
090	PERJALANAN DINAS
091	Perjalanan Presiden / Wakil Presiden ke Daerah
092	Perjalanan Menteri ke Daerah

093	Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon I)
094	Perjalanan Pegawai, termasuk pemanggilan pegawai
095	Perjalanan Tamu asing ke Daerah
096	Perjalanan Presiden/Wakil Presiden ke Luar Negeri
097	Perjalanan Menteri ke Luar Negeri
098	Perjalanan Pejabat Tinggi ke Luar Negeri
099	Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri
100	PEMERINTAHAN
101	-
102	-
103	-
104	-
105	-
106	-
107	-
108	-
109	-
110	PEMERINTAHAN PUSAT
111	Presiden
	Meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah
	Terima Jabatan
111.1	Pertanggung jawaban Presiden kepada MPR
111.2	Amanat Presiden / Amanat Kenegaraan
112	Wakil Presiden
	Meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah Terima jabatan
113	Susunan Kabinet
113.1	Restufle
113.2	Penunjukan Menteri ad interim
113.3	Sidang Kabinet, Sidang Stabilitas Ekonomi, Lihat 500.1
114	Departemen Dalam Negeri
114.1	Amanat Menteri Dalam Negeri
115	Departemen Lainnya
116	Lembaga Tinggi Negara (MA, BPK)
117	Lemabaga Non Departemen
118	Otonomi Desentralisasi
199	Kerjasama antar Departemen
120	PEMERINTAH PROPINSI
120.0.1	Kebijakan Pemerintah Propinsi
120.0.2	Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur
120.0.3	Monografi, Tambahkan kode Wilayah
120.0.4	Laporan Daerah, tambahkan kode wilayah, Monografi, Tambahkan Kode wilayah
120.1	Koordinasi
120.1.1	Satuan Kerja Perangkat Daerah
120.1.2	Instansi Vertikal
120.1.3	Kerjasamaantar Provinsi dan Luar Negeri
121	Kepala Daerah, tambahkan kode wilayah
	Meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan,

122	pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya Wakil Kepala Daerah, tambahkan kode wilayah Meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah Terima jabatan dan sebagainya
123	Sekretaris Wilayah / Daerah, tambahkan kode wilayah Meliputi pencalonan, serah terima jabatan
124	Badan-badan pertimbangan Daerah, meliputi Muspida
125	Pembentukan / Pemekaran
125.1	Pembentukan daerah otonomi
125.2	Pembentukan wilayah
125.3	Perubahan batas wilayah
125.4	Pemekaran wilayah
125.5	Permasalahan Batas Wilayah
125.6	Pemindahan Ibu kota Propinsi
125.7	Pemberian dan Penggantian Nama kota, Daerah, Jalan
126	Pembagian Wilayah
127	Penyerahan Urusan
128	-
129	-
130	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
130.0.1	Kebijakan Pemerintahan kabupaten/kota
130.0.2	Laporan kinerja pertanggungjawaban Bupati/Walikota
130.0.3	Monografi
130.1	Koordinasi
130.1.1	Instansi Tingkat Propinsi
130.1.2	Instansi Vertikal
130.1.3	Kerjasama antar Propinsi/Daerah dan Luar Negeri
131	Kepala Daerah, tambahkan kode wilayah
131.1	Pencalonan, pengangkatan, pelantikan, Pemberhentian, serah terima Jabatan dan sebagainya
132	Wakil Bupati, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, Pemberhentian
133	Sekretaris Daerah
134	Forum koordinasi Pemerintah di Daerah
135	Pembentukan Daerah
135.1	Pembentukan Daerah Otonom
135.2	Pembentukan Batas Wilayah
135.3	Pemekaran Wilayah
135.4	Permasalahan Batas wilayah
135.5	Pemindahan ibu Kota kabupaten/kota
135.6	Pemberian dan penggantian Nama Kota, daerah, jalan
136	Pembagian Wilayah
137	Penyerahan Urusan
138	Pemerintahan Wilayah kecamatan
138.1	Pembentukan kecamatan
138.2	Pemekaran Kecamatan
138.3	Perluasan perubahan batas wilayah kecamatan
138.4	Pemindahan ibu Kota kecamatan
138.5	Laporan Kecamatan
139	-

140	PEMERINTAHAN DESA
141	Pemerintahan Desa, Kelurahan
141.1	Kepala desa, kelurahan
	Pengangkatan, pemberhentian sementara, pelantikan, Serah terima, dsb
141.1.1	Biaya pemilihan kepala desa
141.2	Badan Permusyawaratan Desa (BPD), meliputi pembentukan, Keanggotaan, kepengurusan dan kegiatan LMD
141.3	Perangkat desa/kelurahan
141.3.1	Sekretaris desa/kelurahan
141.3.2	Perangkat Desa Lainnya
142	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
142.1	Rutin/ADD
142.2	Pembangunan
142.3	Anggaran Belanja Tambahan
142.4	Pendapatan Desa
142.4.1	Urusan Desa
142.4.2	Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat
142.4.3	Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Propinsi
142.4.4	Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota
142.4.5	Penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah yang diserahkan kepada Desa
142.4.6	Pendapatan asli desa
142.4.7	Penerimaan lain-lain yang sah berdasarkan peraturan Perundang-Undangan Yang berlaku
142.4.8	Hasil dari gotong royong masyarakat
143	Kekayaan desa
143.1	Tanah hak pakai desa
143.1.1	Tanah Bengkok
143.1.2	Tanah titisara/Tegal Panganan
143.1.3	Tanah desa lainnya
143.2	Jalan desa
143.3	Bangunan desa
143.4	Kekayaan desa
144	Lembaga-lembaga tingkat desa/kelurahan
144.1	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
145	Administrasi desa
146	Kewilayahan
146.1	Perubahan Desa menjadi Kelurahan
146.2	Penggabungan/pembentukan desa
146.3	Perubahan batas wilayah/pelebaran desa/kelurahan
146.4	Perubahan nama-nama desa/kelurahan
146.5	Permasalahan batas desa
146.6	Penghapusan desa/kelurahan
147	Lembaga-lembaga tingkat Desa jangan diklasifikasikan disini. Lihat 410 dengan perinciannya
148	Pembangunan Desa
148.1	Pembinaan usaha gotong-royong
148.1.1	Swadaya gotong royong
148.1.2	Lembaga Sosial Desa (LSD)
148.1.3	Latihan Kerja Masyarakat

148.1.4	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
148.1.5	Penyuluhan
148.2	Perekonomian desa
148.2.1	Produksi Desa
148.2.2	Keuangan Desa
148.2.3	Koperasi Desa
148.2.4	Penataan bantuan pembangunan desa
148.2.5	Alokasi bantuan pembangunan desa
148.2.6	Pelaksanaan bantuan pembangunan desa
148.3	Prasarana Desa
148.3.1	Pembinaan
148.3.2	Bimbingan teknis
148.3.3	Pemukiman kembali penduduk
148.3.4	Pemugaran perumahan dan lingkungan desa
148.4	Pengembangan Desa
148.4.1	Tata Desa
148.4.2	Perlombaan Desa
148.5	Koordinasi
148.5.1	Sektor khusus (K)
148.5.2	Rapat koordinasi horizontal (RKH0)
148.5.3	Team koordinasi pusat
148.5.4	Kerjasama
149	RT - RW
150	LEGISLATIF MPR/DPR
151	Keanggotaan MPR
151.1	Pencalonan
151.2	Pengangkatan
151.3	Pemberhentian
151.3.1	Recall
151.3.2	Meninggal
151.4	Pelanggaran
152	Persidangan
152.1	Keuangan
152.2	Penghargaan
153	Keanggotaan DPD
153.1	Pencalonan
153.2	Pengangkatan dan pengambilan sampah
154	Hak
155	Keanggotaan DPR
155.1	Pencalonan
155.2	Pengangkatan
155.3	Pemberhentian
155.3.1	Recall
155.3.2	Meninggal
155.4	Pelanggaran
155.5	Pergantian antar Waktu
156	Persidangan
156.1	Sidang Pleno
156.2	Dengar Pendapat

156.3	Rapat Komisi
156.4	Reses
157	Jawaban Pemerintah
157.1	Keuangan
157.2	Penghargaan
158	Pinjaman
159	Kunjungan Kerja
160	DPRD PROPINSI
161	Keanggotaan
161.1	Pencalonan
161.2	Pengangkatan
161.3	Pemberhentian
161.3.1	Recall
161.3.2	Meninggal
161.4	Pelanggaran
161.5	Alat Kelengkapan Dewan
161.5.1	Pimpinan
161.5.2	Badan Musyawarah
161.5.3	Komisi
161.5.4	Badan Legislasi Daerah
161.5.5	Badan Anggaran
161.5.6	Badan Kehormatan
161.5.7	Kelengkapan
162	Persidangan
162.1	Sidang Pleno
162.1.1	Rapat paripurna, Rapat Paripurna Istimewa
162.1.2	Rapat Pimpinan DPRD
162.1.3	Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan Legislasi, Rapat Badan Kehormatan, Rapat Pensus
162.1.4	Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Konsultasi
162.1.5	Rapat Kerja, Rapat dengar Pendapat, Rapat dengar Pendapat Umum, rapat Pemandangan Umum
162.1.6	Rapat Fraksi
162.2	Fraksi
162.3	Tata Tertib
162.4	Kode Etik
162.5	Reses
162.6	Peninjauan/Kunjungan Lapangan
162.7	Kunjungan Kerja/Studi Banding/Konsultasi
163	Kesejahteraan
163.1	Keuangan
163.2	Penghargaan
164	Hak
165	-
166	-
167	-
167	-
168	-
169	-
170	DPRD KABUPATEN/KOTA

171	Keanggotaan
171.1	Pencalonan
171.2	Pengangkatan
171.3	Penggantian Antar Waktu (PAW)
171.4	Pemberhentian
171.4.1	Recall
171.4.2	Meninggal
171.4.3	Diberhentikan
171.5	Alat Kelengkapan Dewan
171.5.1	Pimpinan
171.5.2	Badan Musyawarah
171.5.3	Komisi
171.5.4	Badan Legislasi Daerah
171.5.5	Badan Anggaran
171.5.6	Badan Kehormatan
171.5.7	Alat Kelengkapan Lain (Pansus)
172	Persidangan
172.1	Rapat-rapat
172.1.1	Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa
172.1.2	Rapat Pimpinan DPRD
172.1.3	Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat
172.1.4	Badan Legislasi, Rapat Badan Kehormatan, Rapat Pansus
172.1.5	Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Konsultasi
172.1.6	Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar
172.2	Pendapat Umum, Rapat Pemandangan Umum
172.3	Rapat Fraksi
172.4	Fraksi
172.5	Tata Tertib
172.6	Kode etik
172.7	Reses
173	Peninjauan/Kunjungan Lapangan
173.1	Kunjungan Kerja/ Study Banding
173.2	Kesejahteraan
174	Keuangan
175	Penghargaan
176	Hak
177	-
178	-
179	-
180	HUKUM
180.1	Konstitusi
180.1.1	Dasar Negara
180.1.2	Undang-Undang Dasar
180.1.3	Undang-Undang
180.1.4	Peraturan Pemerintah
180.1.5	Keppres/Perpres/Inpres
180.1.6	Kepmen/Permen/Inmen
180.1.7	Perundangan Tingkat Propinsi
180.1.8	Perundangan Tingkat Kabupaten
180.1.9	Perundangan Tingkat Desa
180.2	Tap MPR
181	Perdata
18.1	Tanah

182	Pidana
183	Peradilan
183.1	Jenis-jenis Peradilan
183.1.1	Peradilan Umum
183.1.1.1	Peradilan Negeri Tingkat Pertama
183.1.1.2	Pengadilan Tinggi
183.1.1.3	Mahkamah Agung
183.1.2	Peradilan Agama Islam
183.1.2.1	Pengadilan Agama Islam Tingkat Pertama
183.1.2.2	Pengadilan Tinggi Agama Islam
183.1.2.3	Mahkamah Agung Agama Islam
183.1.3	Peradilan Militer
183.1.3.1	Mahkamah Militer Pertama
183.1.3.2	Mahkamah Militer Tinggi
183.1.3.3	Mahkamah Agung Militer
183.1.4	Peradilan Tata Usaha Negara
183.1.4.1	Peradilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama
183.1.4.2	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
183.1.4.3	Mahkamah Agung Tata Usaha Negara
183.1.5	Mahkamah Konstitusi
183.2	Upaya Hukum
183.2.1	Banding
183.2.2	Kasasi
183.2.3	Derden Verzet
183.2.4	Peninjauan Kembali
183.3	Eksekusi
183.4	Pembinaan Hukum
183.4.1	Pembinaan Kesadaran hukum (KADARKUM)
183.5	Bantuan Hukum
183.5.1	Lembaga Bantuan Hukum
184	Hukum Internasional
185	Imigrasi
185.1	Visa
185.2	Paspor
185.3	Pembebasan Narapidana
185.4	Tahanan Titipan
186	Kepenjaraan
187	Kejaksaan
188	Peraturan Perundang-undangan
189	Hukum Adat
190	HUBUNGAN LUAR NEGERI
191	Perwakilan Asing
192	Tamu Negara
193	Kerjasama dengan Negara Asing
194	Perwakilan RI di Luar Negeri
195	PBB
196	Laporan Luar Negeri
197	-
198	-
199	-
200	POLITIK

201	Perencanaan dan Program Pembinaan Politik Luar Negeri
201.1	Pembinaan Idiologi Pancasila
201.2	Kesatuan bangsa Organisasi Sosial Politik
201.3	Organisasi Kemasyarakatan
201.4	Pelaksanaan Pembinaan Politik dalam Negeri Termasuk Laporannya
201.5	Keadaan Politik Luar negeri
201.6	Pemberitahuan Keadaan Bahaya dari jam Malam meliputi Pemberitahuan, ketentuan Pelaksanaan dan Pengawasan
201.7	Hasil Evaluasi dan tata pelaporan mengenai Ipoleksosbud
201.8	PARPOL
201.8.1	Pendirian atau Pembentukan PARPOL
201.8.2	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARPOL
201.8.3	Program Kerja, Data Kegiatan PARPOL
201.8.4	Pembinaan/koordinasi fasilitas PARPOL
201.8.5	Hasil Munas/Musda PARPOL
201.8.6	Struktur/Kepengurusan, pengkaderan dan keanggotaan PARPOL
201.8.7	Data inventaris dan keuangan PARPOL
201.9	Partai/organisasi terlarang
201.9.1	Keputusan pembubaran partai/organisasi terlarang
201.9.2	Daftar dan data pengurus anggota partai organisasi terlarang
201.9.3	Ijin meninggalkan tempat atau domisili bagi anggota partai/organisasi terlarang
201.9.4	Daftar berkala mengenai keadaan organisasi/anggota partai/organisasi terlarang
201.9.5	Laporan Umum mengenai keadaan anggota partai /organisasi terlarang
202	Organisasi Kemasyarakatan
202.1	Pembentukan Organisasi
202.2	Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga
202.3	Kepengurusan dan Daftar anggota organisasi
202.4	Program kerja organisasi
202.5	Munas/Musda Propinsi/Kabupaten/Kota
202.6	Pembinaan Organisasi
202.7	Kegiatan organisasi
202.8	Daftar Inventarisasi kekayaan organisasi
202.9	Lembaga Swadaya masyarakat
202.9.1	Pembentukan organisasi
202.9.2	Kepengurusan dan Daftar anggota organisasi
202.9.3	Kepengurusan dasar dan daftar anggota organisasi
202.9.4	Program Kerja Organisasi
202.9.5	Laporan Kegiatan Organisasi
203	Orde Pemerintahan
203.1	Orde Lama
203.2	Orde Baru
203.3	Orde Reformasi
204	-
205	-

206	-
207	-
208	-
209	-
210	KEPARTAIAN
211	Partai Politik
211.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
211.2	Pogram Kerja, Data Kegiatan PARPOL
211.3	Pembinaan PARPOL
211.4	Hasil Munas/Musda PARPOL
211.5	Struktur Kepengurusan, Pengkaderan, dan Keanggotaan PARPOL
211.6	Data Inventaris dan Keuangan PARPOL
212	Partai/Organisasi Terlarang
212.1	Keputusan Pembunaran Partai
212.2	Daftar dan Data Pengurus Anggota Partai
212.3	Ijin Meninggalkan Tempat
212.4	Daftar Berkala Mengenai Keadaan Anggota Partai
212.5	Laporan Umum Mengenai Keadaan Anggota Partai
213	-
214	-
215	-
216	-
217	-
218	-
219	-
220	ORGANISASI KEMASYARAKATAN
221	Pembentukan Organisasi
221.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
221.2	Kepengurusan dan Daftar Anggota Organisasi
221.3	Program kerja Organisasi
221.4	Munas/Musda Propinsi Kabupaten/Kota
222	Pembinaan Organisasi
222.1	Kegiatan Organisasi dan Pendapatannya
222.2	Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi
223	Berdasarkan Keagamaan dan Kerokhanian
223.1	Muhammadiyah
223.2	NU
223.3	Persatuan Tarikat Islam
224	Berdasarkan Kesosialan
225	-
226	-
227	-
228	-
229	-
230	ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL
231	Ikatan Dokter Indonesia
232	Persatuan Guru Republik Indonesia
233	Persatuan Sarjana hukum Indonesia
234	Persatuan Advokat Indonesia
235	Lembaga Bantuan Hukum
236	Korps Pegawai Republik Indonesia
237	Persatuan Wartawan Indonesia

238	Ikatan Arsiparis Indonesia
239	Ikatan Pustakawan Indonesia
240	ORGANISASI PEMUDA
241	Pembentukan Organisasi
241.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
241.2	Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
241.3	Program Kerja organisasi
241.4	Munas/Musda Provinsidan Kabupaten/Kota
242	Pembinaan organisasi
242.1	Kegiatan organisasi dan pelaporannya
242.2	Daftar inventaris kekayaan organisasi
243	Komite Nasional Pemuda Indonesia
244	Organisasi Mahasiswa
245	Organisasi Pelajar
246	Gerakan Pemuda Anisor
247	Gerakan pemuda Islam Indonesia
248	Gerakan Pemuda Marhaenis
249	-
250	ORGANISASI BURUH, TANI, DAN NELAYAN
251	Pembentukan organisasi
251.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
251.2	Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
251.3	Program Kerja organisasi
251.4	Munas/Musda Provinsidan Kabupaten/Kota
252	Pembinaan organisasi
252.1	Kegiatan organisasi dan pelaporannya
252.2	Daftar inventaris kekayaan organisasi
253	Federasi Buruh seluruh Indonesia
254	Organisasi Buruh Internasional
255	Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
256	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
257	-
258	-
259	-
260	ORGANISASI WANITA
261	Pembentukan Organisasi
261.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
261.2	Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
261.3	Program Kerja organisasi
261.4	Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota
262	Pembinaan organisasi
262.1	Kegiatan organisasi dan pelaporannya
262.2	Daftar inventaris kekayaan organisasi
263	Dharma Wanita
264	Kongres Wanita Indonesia
265	Persatuan Wanita Republik Indonesia
266	-
267	-
268	-
269	-

270	PEMILIHAN UMUM
271	Pencalonan
272	Tanda Gambar
273	Kampanye
273.1	Dana kampanye
274	Petugas Pemilu
274.1	KPU
274.2	PPK
274.3	PPS
274.4	KPPS
274.5	Pemantau
275	Pemilih
275.1	Pendaftaran Pemilih
275.2	Daftar pemilih sementara
275.3	Daftar pemilih tambahan
275.4	Daftar pemilih tetap
275.5	Kartu pemilih
276	Sarana
276.1	TPS
276.2	Kendaraan
276.3	Surat Suara
276.4	Kotak Suara
276.5	Bilik Suara
277	Pemungutan suara
277.2	Pemungutan suara dan perhitungan suara
277.2	Rekapitulasi perhitungan suara
278	Hasil Pemilu
278.1	Penetapan Terpilih dan pembagian kursi anggota legislatif
278.2	Penetapan Pemilihan Pilkada
279	-
280	PANWASLU
280.1	Panwaslu Propinsi
280.2	Panwaslu Kabupaten/Kota
280.3	Panwaslu Kecamatan
281	Pelanggaran Pemilu
282	Sengketa pemilu
283	Pemantauan
284	-
285	-
286	-
287	-
289	-
290	-
291	-
292	-
293	-
294	-
295	-
296	-
297	-

298	-
299	-
300	KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
300.1	Kebijakan pemerintah mengenai situasi dan kondisi keamanan
300.2	Pembinaan dan pengaturan mengenai larangan
300.3	Pencegahan penanggulangan gangguan/ancaman keamanan/ketertiban umum
300.4	Prosedur Tetap Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum
301	Koordinasi dan kerjasama keamanan dan ketertiban umum (Trantibum)
302	Pengawasan Trantibum
303	Penegakkan Pelaksanaan Perda
304	Pembinaan penyuluhan Pelanggaran Perda
305	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
306	Patroli Wilayah
306.1	Pengamanan
306.2	Pengawalan
307	Pemberitahuan keadaan bahaya dan jam malam meliputi pemberitahuan, ketentuan pelaksanaan dan pengawasan
308	-
309	-
310	PERTAHANAN
311	Darat
312	Laut
313	Udara
314	Ketahanan Bangsa
315	Ketahanan Ekonomi
316	Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
317	-
318	-
319	-
320	KEMILITERAN/TNI/POLRI
321	Latihan Militer
322	Wajib Militer
323	Operasi Militer
324	Teritorial TNI/POLRI
325	Kekaryaannya TNI
326	Kemanunggalan TNI dengan Rakyat
327	-
328	-
329	-
330	KEAMANAN
331	Kepolisian
331.1	Polisi Pamong Praja
332	Huru-hara / Demonstrasi

333	Senjata Api/tajam
334	Bahan Peledak
335	Perjudian
336	Surat-surat kaleng
337	Pengaduan Masyarakat
338	Himbauan atau Larangan
339	-
340	PERTAHANAN SIPIL / LINMAS
	Kebijaksanaan Pemerintah mengenai pembentukan
340.1	Mawil dan Matrik Hansip/Linmas
340.1.1	Pengankatan/pemberhentian anggota Hansip/Linmas
340.1.2	Pengarahan dan pengendalian Hansip/Linmas
340.1.3	Kegiatan pelaksanaan Matrik Hansip/Linmas dan Merwa
340.1.4	Pembinaan anggota Hansip/Linmas
340.1.5	Penghargaan anggota Hansip/Linmas
340.1.6	Hansip/Linmas lanjut Usia
340.1.7	Data Matrik Hansip/Linmas dan Merwa
340.1.8	Pendidikan/latihan Hansip/Linmas dan Merwa
340.1.9	Latihan ketrampilan PAM Swakarsa
340.2.0	Pemberian tali asih bagi anggota Hansip/Linmas
341	Orientasi kesadaran bela bangsa
341.1	Orientasi kesadaran bela Negara bagi tokoh agama dan masyarakat
341.2	Orientasi kesadaran bela Negara bagi tokoh pemuda dan pelajar
342	-
343	-
344	-
345	-
346	-
347	-
348	-
349	-
350	KEJAHATAN
351	Makar / Pemberontakan
352	Penganiayaan, Pembunuhan
353	Pencurian, Perampasan, Perampokan
354	Penyelundupan, Narkotika
355	Pemalsuan, penggelapan
355.1	Uang
355.2	Ijasah
355.3	Kejahatan pemalsuan lainnya
356	Korupsi/Penyelewengan/ penyalahgunaan jabatan
357	Kekerasan pada Perempuan dan Anak
357.1	Pelaporan
357.2	Penanganan Korban
358	Kenakalan
359	Kejahatan Lainnya
360	BENCANA

360.1	Pelatihan
360.2	Surat keputusan
360.3	Berita acara
361	Gunung berapi/ gempa
362	Banjir/Tanah longsor
363	Angin Topan
364	Keba karan
364.1	Pemadam Kebakaran
365	Kekeringan
366	Posko Bencana
367	Koordinasi/unsur pengarah penanggulangan Bencana
368	MOU Pemerintah Pusat BNPB
369	-
370	KECELAKAAN
	(Klasifikasi disini: SAR)
371	Latihan SAR anggota Menwa
372	Latihan ketrampilan penyelamatan di air dan menyelam
373	Pelatihan manajemen bagi pejabat
374	Satkorlak dan Satlak PBP
375	Pelatihan kemampuan PUSDALOP bagi aparat PBB
376	Latihan keterampilan pemadam kebakaran
377	Kecelakaan lalu lintas jalan raya
378	Investigasi/ Penyelidikan kecelakaan
379	Asuransi Kecelakaan
380	PENDAMPINGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
381	Perencanaan (Perencanaan teknis, Rekomendasi)
382	Bantuan Bencana
383	Penanggulangan bencana dengan pihak lain
384	Sarana prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi
385	PUSDALOPS
386	Kunjungan Lapangan
387	Relawan
388	Laporan Bencana
389	-
390	KERJASAMA BPBD DENGAN INSTANSI LAIN
391	Lembaga Pemerintah Pusat
392	Lembaga Pemerintah Di Daerah
393	Lembaga Internasional
394	Lembaga Non Pemerintah Nasional
395	-
396	-
397	-
398	-
399	-
400	KESEJAHTERAAN RAKYAT
401	Kebijakan dan program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat
402	-
403	-
404	-
405	-

406	-
407	-
408	-
409	-
410	PEMBANGUNAN DESA
411	Pembinaan usaha gotong royong
411.1	Swadaya gotong royong
411.1.1	Penataan gotong royong
411.1.2	Gotong royong Dinamis
411.1.3	Gotong royong statis
411.1.4	Pungutan
411.2	Lembaga Ketahanan Masyarakat desa (LKMD)
411.2.1	Pembinaan
411.2.2	Klasifikasi
411.2.3	Proyek
411.2.4	Musyawarah
411.3	Latihan Kerja Masyarakat
411.3.1	Kader Masyarakat
411.3.2	Kuliah Kerja Nyata (KKN)
411.3.3	Pusat Latihan
411.3.4	Kursus-kursus
411.3.5	Kurikulum / Syllabus
411.3.6	Ketrampilan
411.3.7	Pramuka
411.4	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
411.4.1	Program
411.4.2	Pembinaan Organisasi
411.4.3	Kegiatan
411.5	Publikasi
411.5.1	Peragaan
411.5.2	Sosio Darma / Bakti sosial
411.5.3	Siaran Pedesaan
411.5.4	Penyuluhan Lapangan
411.6	Kelembagaan Desa
411.6.1	Kelompok Tani
411.6.2	Rukun tani
411.6.3	Subak
411.6.4	Dharma tirta
412	Perekonomian desa
412.1	Produksi desa
412.1.1	Pengolahan
412.1.2	Pemasaran
412.2	Keuangan desa
412.2.1	Perkreditan desa
412.2.2	Inventarisasi data
412.2.3	Perkembangan / Pelaksanaan
412.2.4	Bantuan / Stimulasi
412.2.5	Petunjuk / Pembinaan pelaksanaan
412.3	Koperasi Desa
412.3.1	Badan Usaha Unit Desa (BUUD)

412.3.2	Koperasi Usaha Unit Desa (KM)
412.4	Penataan bantuan pembangunan desa
412.4.1	Jumlah desa yang diberi bantuan
412.4.2	Pengarahan
412.4.3	Pusat
412.4.4	Daerah
412.5	Alokasi Bantuan Pembangunan Desa
412.5.1	Pusat
412.5.2	Daerah
412.6	Alokasi Bantuan Pembangunan desa
412.6.1	Bantuan Langsung
412.6.2	Bantuan Keserasian
412.6.3	Bantuan Juara Lomba desa
413	Prasarana Desa
413.1	Prasarana Desa
413.1.1	Pembinaan
413.1.2	Bimbingan Teknis
413.2	Pemukiman kembali Penduduk
413.2.1	Lokasi
413.2.2	Diskusi
413.2.3	Pelaksanaan
413.3	Masyarakat Pradesa
413.3.1	Pembinaan
413.3.2	Penyuluhan
413.4	Pemugaran perumahan dan lingkungan desa
413.4.1	Rumah Sakit
413.4.2	Proyek perintis Pelaksanaan
413.4.3	Pengembangan
413.4.4	Perbaikan Kampung
414	Pengembangan Desa
414.1	Tingkat Perkembangan Desa
414.1.1	Jumlah Desa
414.1.2	Pemekaran Desa
414.1.3	Pembentukan Desa Baru
414.1.4	Evaluasi
414.1.5	Bagian
414.2	Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP), Musrenbang Kecamatan
414.2.1	Penyuluhan Program/Fasilitas Program
414.2.2	Lokasi UDKP
414.2.3	Pelaksanaan
414.2.4	Bimbingan/ pembinaan
414.2.5	Evaluasi
414.3	Tata Desa / Profil desa dan kelurahan
414.3.1	Inventarisasi
414.3.2	Penyuluhan Pola Tata Desa
414.3.3	Pemetaan
414.3.4	Pedoman Pelaksanaan
414.3.5	Evaluasi
414.4	Perlombaan Desa
414.4.1	Pedoman
414.4.2	Penilaian

414.4.3	Kejuaraan
414.4.4	Piagam
415	Koordinasi
415.1	Sektor Usaha (K)
415.2	Rapat Koordinasi Horisontal
415.3	Team Koordinasi Pusat (TKP)
415.4	Kerjasama
415.4.1	Luar Negeri (Unicef)
415.4.2	Perguruan Tinggi
415.4.3	Departemen / Lembaga Non Departemen
416	-
417	-
418	-
419	-
420	PENDIDIKAN
	Pendidikan Khusus
	(Klasifikasi disini: Pendidikan Putera-puteri Irian Jaya)
420.1	Kebijakan dan program pemerintah untuk Pendidikan
	Pendidikan karakter bangsa, wawasan kebangsaan,
	Jiwa nasionalisme, dsb)
420.2	
420.3	Pendidikan Kemsyarakatan
421	Sekolah
421.1	Pra Sekolah
421.2	Sekolah Dasar
421.3	Sekolah Menengah
421.4	Sekolah tinggi
421.5	Sekolah kejuruan
421.6	Kegiatan sekolah Dies natalis, Lustrum
421.7	Kegiatan Pelajar Reuni, Darmawisata, Lomba
	Klasifikasi disini: Pelajar teladan, Pertukaran pelajar
421.8	Sekolah pendidikan luar biasa
421.9	Pendidikan luar sekolah/pemberantasan buta huruf
421.10	Perijinan
421.10.1	Pendidikan formal
421.10.2	Pendidikan Non formal
422	Administrasi Sekolah:
422.1	Persyaratan Masuk sekolah, testing, ujian, Pendaftaran,
	mapram, Perpeloncoan, OSPEK
422.2	Tahun Pelajaran
422.3	Hari Libur
422.4	Uang sekolah
	Klasifikasi disini SPP
422.5	Beasiswa
422.6	Ijazah
423	Metode belajar
423.1	Kuliah
423.2	Ceramah, Simposium, Seminar
423.3	Diskusi
423.4	Kuliah lapangan, Widyawisata, KKN
423.5	Kurikulum

423.6	Karya tulis, Karya Ilmiah
423.7	Ujian
424	Tenaga Pengajar-Guru, Dosen, Dekan, Rektor Klasifikasi disini: guru teladan
424.1	Pertukaran Guru ke Luar negeri
424.2	Sertifikasi Guru
425	Sarana Pendidikan
425.1	Gedung/ Bangunan Pendidikan
425.1.1	Gedung Sekolah
425.1.2	Kampus
425.1.3	Pusat Kegiatan
425.1.4	Perpustakaan
425.1.5	Laboratorium
425.2	Buku
425.3	Perlengkapan Pendidikan
425.4	Sistem informasi pendidikan
425.5	Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan

426

KEOLAHRAGAAN

426.1	Pembinaan Keolahragaan
426.1.1	Olahraga Prestasi (PON, Sea Games, Kejurnas, Olympiade)
426.1.2	Olahraga Pendidikan (POPDA SD, Porseni, dll)
426.1.3	Olahraga Rekreasi / massal (Senam, Sepeda santai, Olahraga tradisional)
426.1.4	Iptek dan Industri olahraga
426.1.5	Sarana Prasarana Keolahragaan
426.1.5.1	Gedung Olahraga
426.1.5.2	Stadion
426.1.5.3	Lapangan Olahraga
426.1.5.4	Kolam Renang
426.2	Kemitraan Olahraga
426.3	Hobby
427	KEPEMUDAAN

Meliputi organisasi dan kegiatan remaja klasifikasi disini:

427.1	Gelanggang Remaja
427.2	Pertukaran Pemuda
427.3	Paskibra
427.4	Kemitraan Pemuda
427.5	Karang taruna
428	Kepramukaan
429	Pendidikan Kedinasan Untuk Departemen Dalam Negeri Lihat 890

430

KEBUDAYAN

430.1	Kebijakan dan program pemerintah untuk kebudayaan
430.2	Pembinaan bidang kebudayaan
431	kesenian
431.1	Cabang kesenian
431.2	Sarana
431.2.1	Gedung Kesenian

431.2.2	Padepokan
431.2.3	Lembaga Adat
431.3	Usaha pertunjukkan
432	Kepublikalaan
432.1	Museum
432.2	Peninggalan kuno
432.2.1	Candi, termasuk pemugaran
432.2.2	Benda
433	Sejarah
434	Bahasa
435	Usaha pertunjukkan, hiburan, kesenangan
436	Kepercayaan
437	Festival, pentas seni
438	Pembinaan organisasi kesenian
439	-
440	KESEHATAN
440.1	Kebijakan dan program pemerintah untuk kesehatan
441	Pembinaan Kesehatan
441.1	Gigi
441.2	Mata
441.3	Jiwa
441.4	Kanker
441.5	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
441.6	Perawatan
441.7	Penyuluhan kesehatan masyarakat (PKM)
441.8	Kesehatan ibu dan anak
441.9	Sistem Kesehatan nasional
441.9.1	JPS BK (jaringan pengaman sosial Bidang Kesehatan)
441.9.2	JAMKESMAS
441.9.3	JAMKESDA
441.9.4	JAMPERSAL
441.9.5	Jaminan Lainnya
442	Obat-obatan
442.1	Pengadaan
442.2	Penyimpanan
442.3	Obat Generik
442.4	Pemalsuan
442.5	Obat terlarang
443	Pemberantasan penyakit
443.1	Pencegahan
443.2	Pembeantasan dan Pencegahan Penyakit menular langsung (P.2.M.L.)
443.2.1	Kusta
443.2.2	Kelamin, HIV, AIDS, IMS
443.2.3	<i>Frambusia</i>
443.2.4	T.B.C
443.3	Epidemiology dan Karantina (Epidka)
443.3.1	<i>Kholera</i>
443.3.2	Imunisasi
443.3.3	<i>Surveilense</i>
443.3.4	Antrak

443.3.5	<i>Leptosirostis</i>
443.3.6	Chikungnya
443.3.7	SARS
443.4	Pemberantasan pencegahan penyakit menular sumber Binatang (P.2.B)
443.4.1	Malaria
443.4.2	<i>Dengue Haemorrhagic Fever</i> (Demam Berdarah, DHF)
443.4.3	Filaria
443.4.4	Serangga
443.4.5	Rabies
443.5	Hygiene sanitasi
443.5.1	Tempat-tempat pembuatan dan penjualan makanan dan minuman (TPPMM), jasa boga
443.5.2	Sarana air minum
443.5.3	Pestisida
443.5.4	Pencemaran udara
443.5.5	Jamban keluarga
443.5.6	Kesehatan Institusi
443.6	Pemberantasan penyakit tidak menular
443.6.1	A. Pektoris
443.6.2	I M A
443.6.3	Hipertensi
443.6.4	Stroke
443.6.5	Diabetes Militus (DM)
443.6.6	CA. service
443.6.7	CA. <i>Mammæ</i>
443.6.8	CA. Hepa
443.6.9	CA. Paru
443.7	DIKOPENSATIOKORDIS
443.7.1	PPOM
443.7.2	Asma
443.7.3	Kecelakaan lalu lintas
443.7.4	Psikosis
444	Gizi
444.1	Kekurangan Makanan
444.2	Bahaya Kelaparan, busung lapar
444.3	Keracunan makanan
444.4	Menu makanan rakyat
444.5	Gondok Endemik (GAKY)
445	Rumah sakit
445.1	RSUP
445.2	Rumah sakit Jiwa
445.3	Rumah sakit mata
445.4	PUSKESMAS DAN PUSKESMAS Keliling
445.5	Poliklinik (Balai Kesehatan)
445.6	Rumah Bersalin
445.7	Posyandu
445.8	Rumah sakit/ Balai kesehatan lainnya
445.9	Laboratorium Kesehatan
446	Tenaga medis
446.1	Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
447	Peralatan Kesehatan
447.1	Pengadaan alat kesehatan

447.2	Pentimapanan alat kesehatan
447.3	Standarisasi alat kesehatan
447.4	Penghapusan alat kesehatan
448	Pengobatan tradisional
448.1	pijat
448.2	Tusuk jarum
448.3	Jamu tradisional
448.4	Dukun
449	Perijinan
449.1	Surat ijin Praktek (SIP)
449.2	Surat Ijin Kerja (SIK)
450	AGAMA
450.1	Kebijakan dan program pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan Bidang keagamaan
450.2	Bantuan dibidang keagamaan
451	Islam
451.1	Peribadatan
451.1.1	Sholat
451.1.2	Zakat, Infaq, Sadaqoh, Amal
451.1.3	Puasa
451.1.4	Haji (jangan diklasifikasikan disini. Lihat 456)
451.2	Tempat Ibadah
451.3	Tokoh agama
451.4	Pendidikan
451.4.1	Tinggi
451.4.2	Menengah
451.4.3	Dasar
451.4.4	Pondok Pesantren
451.4.5	Gedung sekolah
451.4.6	Tenaga pengajar
451.4.7	Buku
451.4.8	Daikwa
451.4.9	Organisasi/lembaga pendidikan
451.5	Harta Agama Wakaf, Baitumal dsb
451.6	Pendidikan non formal
451.7	Organisasi keagamaan bukan politik, Majelis Ulama
451.8	Peribadatan
452	Protestan
452.1	Peribadatan
452.2	Tempat Ibadah
452.3	Tokoh Agama, Rokhaniawan, Domine
452.4	Mazhab
452.5	Organisasi Gerejani
453	Katholik
453.2	Peribadatan
453.2	Tempat Ibadah
453.3	Tokoh Agama, Rokhaniawan, Pastur
453.4	Mazhab
453.5	Organisasi Gerejani
454	Hindu
454.1	Peribadatan
454.2	Tempat Ibadat

454.3	Tokoh Agama, Rokhaniawan
454.4	Mazhab
454.5	Organisasi Agama Hindu
455	Budha
455.1	Peribadatan
455.2	Tempat Ibadah
455.3	Tokoh Agama, Rokhaniawan
455.4	Mazhab
455.5	Organisasi Agama Budha
456	Kong Hu Chu
456.1	Peribadatan
456.2	Rumah Ibadat KeInteng
456.3	Tokoh Agama, Rokhaniawan
456.4	Mazhab
456.5	Organisasi agama Kong Hu Chu
457	Urusan Haji
458	-
459	-
460	SOSIAL
461	Rehabilitasi Penderita cacat
461.1	Cacat mata
461.2	Cacat tubuh
461.3	Cacat Mental
461.4	Bisu / Tuli
461.5	Cacat lain
462	Tuna sosial
462.1	Gelandangan
462.2	Pengemis
462.3	Tuna Susila
462.4	Anak nakal
462.5	Tuna wisma
463	Kesejahteraan anak / keluarga
463.1	Anak putus sekolah
463.2	Ibu teladan
464	Pembinaan Pahlawan
464.1	Pahlawan
	Meliputi penghargaan kepada pahlawan, tunjangan kepada pahlawan dan tandanya
464.2	Perintis Kemerdekaan
	Meliputi pembinaan, penghargaan kepada pahlawan, tunjangan kepada pahlawan dan tandanya
464.3	Cacat Veteran
465	Kesejahteraan sosial
465.1	Lanjut Usia
465.2	Korban kekacauan, Pengungsian, Rehabilitasi
466	Sumbangan sosial
466.1	Korban Bencana
466.2	Pencarian dana untuk sumbangan
	Meliputi : penyelenggaraan undian, ketangkasan, bazar dan

	sebagainya
466.3	Panti Asuhan
467	Bimbingan Sosial
467.1	Masyarakat suku terasing
	Meliputi : Bimbingan, pendidikan, kesehatan, pemukiman, operasi busana dan sebagainya
468	PMI
469	Makam
469.1	Umum
469.2	Pahlawan
469.3	Khusus Keluarga, Raja
469.4	Krematorium
470	KEPENDUDUKAN
470.1	Kebijakan dan program pemerintah untuk kependudukan
471	pendaftaran penduduk
471.1	Identitas Penduduk
471.1.1	Biodata
471.1.2	Nomor Induk kependudukan
471.1.3	Kartu Tanda Penduduk
471.1.4	Kartu Keluarga
471.1.5	Adokasi identitas penduduk
471.2	WNI keturunan asing
471.2.1	Permohonan Kewarganegaraan
471.2.2	Permohonan ganti nama
471.3	Asimilasi
472	Kewarganegaraan asing
473	Tidak berkewarganegaraan (<i>state less</i>)
474	Pendaftaran penduduk
474.1	Kelahiran
474.1.1	Adopsi
474.2	Perkawinan / perceraian/ rujuk
474.3	Kematian
474.4	Kartu penduduk
475	Transmigrasi
475.1	Penyiapan informasi daerah transmigrasi
475.1.1	Informasi potensi peluang bekerja dan berusaha di daerah transmigrasi
475.1.2	Perbandingan potensi daerah asal dan daerah transmigrasi
475.1.3	Pemasyarakatan/sosialisasi transmigrasi
475.1.4	Peran serta lembaga dan instansi terkait serta media massa dalam penyampaian informasi transmigrasi
475.1.5	Publikasi Transmigrasi melalui pameran dan keserian
475.1.6	Bimbingan dan penyukuhan transmigrasi bagi masyarakat daerah asal dan daerah transmigrasi
475.1.7	Kerja sama dibidang Transmigrasi
475.1.8	Pengembangan, struktur wilayah dan analisis data wilayah transmigrasi
475.2	Pemukiman Transmigrasi
475.2.1	Penggunaan tanah pemukiman Transmigrasi
475.2.2	Pengembangan, struktur wilayah dan analisis data wilayah transmigrasi

- 475.2.3 Tata ruang satuan kawasan pengembangan, studi kelayakan dan dampak lingkungan transmigrasi
- 475.2.4 Teknis ruang satuan pemukiman dan lokasi/peta informasi pemukiman
- 475.2.5 Standarisasi dan spesifikasi teknis rumah transmigran, fasilitas umum sosial dan jaringan transportasi
- 475.2.6 Tanah pemukiman, pengadaan areal tanah dan pembebasannya, identifikasi, pengukuran dan pembuatan batas areal tanah
- 475.2.7 Penyelesaian masalah tanah dan lokasi pemukiman transmigrasi
- 475.2.8 Tata Ruang pemukiman transmigrasi
 - 475.2.8.1 Rancangan dan pemanfaatan areal tanah
 - 475.2.8.2 Rancangan kapling TSM
 - 475.2.8.3 Pengukuran dan Pembagian lahan pekarangan, lahan usaha dan fasilitas umum
 - 475.2.8.4 Penyelesaian kekurangan lahan usaha kepada transmigran dan sengketa tanah :
 - 475.2.8.5 Inventarisasi penataan kembali dan penggunaan areal tanah
 - 475.2.8.6 Pengukuran batas unit pemukiman
 - 475.2.8.7 Penyelesaian perubahan areal dan urusan perijinan pemanfaatan areal tanah
- 475.2.9 Sarana pemukiman transmigrasi
 - 475.2.9.1 Pembinaan dan pengendalian, penyiapan bangunan rumah transmigran dan jamban keluarga dan fasilitas umum
 - 475.2.9.2 Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sumber air bersih
 - 475.2.9.3 Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sumber energi
 - 475.2.9.4 Pembinaan dan pengendalian peningkatan sarana
 - 475.2.9.5 Pembinaan, pengendalian dan teknis peningkatan potensi lahan dan lingkungan
- 475.3 Pengerahan, pemindahan dan penempatan
 - 475.3.1 Pengkajian dan pengembangan metode pengerahan dan penempatan
 - 475.3.2 Teknis penyuluhan dan motivasi dalam pengerahan dan penempatan
 - 475.3.3 Pengerahan
 - 475.3.3.1 Pendaftaran dan seleksi calon transmigran
 - 475.3.3.2 Berkas Persyaratan dan administrasi calon transmigran
 - 475.3.3.3 Transmigran yang dinyatakan lulus penyaringan
 - 475.3.4 Pemberangkatan Transmigran
 - 475.3.4.1 Pengangkutan transmigran melalui laut, udara, dan darat
 - 475.3.4.2 Jadwal dan tempat pelaksanaan pemberangkatan
 - 475.3.4.3 Pelaksanaan pengurusan Pemberangkatan
 - 475.3.4.4 Pengawasan perjalanan transmigran
 - 475.3.4.5 Pengaturan rute pemberangkatan
 - 475.3.4.6 Alokasi penempatan dan Surat perintah pemberangkatan
 - 475.3.5 Penempatan transmigran

475.3.5.1	Kesiapan lokasi dan daya tampung
475.3.5.2	Pendataan transmigran dilokasi yang masih dihina
475.3.5.3	Data Transmigran yang meninggalkan lokasi UPT
475.3.5.4	Pemantauan penempatan transmigrasi pengganti
475.4	Penampungan transmigrasi (transito), dan pelatihan transmigran
475.4.1	Pelatihan Transmigran
475.4.1.1	Program pengajaran dan metode pelatihan
475.1.1.2	Penyusunan silabus dan modul pelatihan
475.1.1.3	Penyusunan calon peserta/pelatih
475.4.2	Penampungan transmigran di transito
475.4.2.1	Pelayanan kesehatan bagi transmigran
475.4.2.2	Pelayanan makanan bagi transmigran
475.4.2.3	Pelayanan perbekalan/peralatan bagi transmigran
475.5	Pembinaan masyarakat tranmigrasi
	Identifikasi dan penjajagan
475.5.1	pembinaan.
475.5.1.2	Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis, pembinaan tahap penyesuaian
475.5.1.3	Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis, pembinaan tahap pengembangan
475.5.1.4	Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pembinaan
475.5.2	Pembinaan pendidikan
475.5.2.1	Penyediaan / penyiapan sarana dan usaha pengembangan pendidikan
475.5.2.2	Pelaksanaan penyiapan tenaga pendidikan dan dtatus
475.5.3	Pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat
475.5.4	Pembinaan kesehatan
475.5.4.1	Penanggulangan penyakit dan kejadian luar biasa
475.5.4.2	Pendistribusian bantuan pangan
475.5.5	Pembinaan rokhani
475.5.5.1	Bimbingan mental spiritual dan penyediaan petugas agama
475.5.5.2	Bimbingan adaptasi masyarakat
475.5.5.3	Bimbingan pelaksanaan menumbuhkan interaksi sosial
475.5.6	Pelayanan pas di daerah transmigrasi
475.5.7	Penyerahan UPT yang layak untuk diserahkan
475.5.8	Penilaian transmigran teladan
475.5.9	Pemantauan dan penilaian kelayakan usaha
476	Keluarga Berencana
476.1	Alat kontrasepsi
476.2	KB Lestari
476.3	KB Mandiri
476.4	Penyuluh Lapangan KB (PLKB)
476.5	Pos KB desa
476.6	Akseptor KB
477	Catatan sipil
478	-
479	-

480	MEDIA MASA
480.1	Kebijakan dan program pemerintah dalam bidang media massa
481	Media cetak meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila terjadi pelanggaran
481.1	Penerbitan
481.1.1	Surat kabar
481.1.2	Majalah
481.1.3	Buletin
481.1.4	Klarifikasi Berita
481.1.5	<i>Press Release</i>
481.1.6	Layanan informasi / <i>Leaflet</i>
481.1.7	Masukan Analisis Gubernur
481.1.8	Jurnal Mingguan ringkasan Berita
481.1.9	Jurnal mingguan pendapatan umum
481.2	Liputan media masa
481.2.1	Liputan rutin
481.2.2	Liputan khusus
481.2.2.1	Arus Lebaran
481.2.2.2	Pemberangkatan dan Kepulangan Haji
481.3	Pencabutan Surat Ijin
481.3.1	Surat Kabar
481.3.2	Majalah
481.3.3	Buletin
481.4	Laporan dan Hasil Pemberitaan
481.4.1	Surat kabar
481.4.2	Majalah
481.4.3	Buletin
481.4.4	Kegiatan Bidang
481.4.5	Grafika
482	Media elektronik
482.1	Radio
482.2	Televisi
482.3	Film Dokumenter
482.4	Pengawasan Lembaga Penyiaran
482.5	Kelompok Pemantau isi siaran
482.6	Sumber Daya Manusia Penyiaran
482.7	Film
483	<i>Reklame</i>
483.1	Ketentuan Pemasangan
483.2	Penerbitan
483.3	Pameran Non Komersial
484	Kewartawanan
484.1	Pembentukan Organisasi Profesi
484.2	Terjadinya kasus penghinaan, Pemukulan, Penganiayaan terhadap Wartawan
484.3	Penyalahgunaan profesi
484.4	Bantuan kepada/Dari organisasi profesi wartawan
484.5	Musyawarah wartawan Indonesia
484.6	Kebijakan pimpinan wartawan/pendidikan jurnalistik

484.7	Temu Pers/Konferensi pers
484.8	<i>Pers Tour</i>
484.9	Wawancara/ Audiensi wartawan
485	Penyuluhan Masyarakat
485.1	Publikasi
485.2	Pendirian Information Center
486	Peningkatan kapasitas Bidang Infokom
486.1	Training Fotografi
486.2	Training Berita Jurnalistik
486.3	Bintek Infokom
486.4	Rakorda Infokom
486.5	Rakor pengendalian Kegiatan
487	Hubungan Antar lembaga
487.1	Organisasi Kemasyarakatan
487.1.1	Wahana Komunikasi Masyarakat
487.1.2	Bintek Pengurus LKM
487.1.3	Bahan Informasi Cetak LKM
487.1.4	Fasilitas peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan media
487.1.5	Pelatihan Motivator Kapa narkoba
487.1.6	Pembekalan LSM/Upaya PBBN
487.1.7	Bahan Informasi Sosialisasi PPBN
487.2	Lembaga Pemerintah
487.2.1	Pertemuan Bakohumas
487.2.2	Pertemuan Kehumasan
487.2.3	Komisi penyiaran Indonesia Daerah (KPID)
487.3	Luar negeri
487.3.1	Promosi Luar Negeri
487.3.2	Kunjungan Wartawan Asing
488	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Informasi
48.1	Pembuatan Foto Blow Up Slide
488.2	Tayangan Udara tentang Kebijakan dan hasil Pembangunan
488.2.1	Kran Info
488.2.2	Halo Gubernur
488.2.3	Fokus Utama
488.3	Pelayanan Informasi Melalui Feature
488.4	Pelayanan Informasi Melalui Spot
488.4.1	Televisi
488.4.2	Radio
488.5	Pelayanan Informasi Melalui Media Tradisional
488.5.1	Karawitan
488.5.2	Wayang kulit
488.5.3	Guyon Maton
488.6	Dialog Interaktif
488.6.1	Televisi (TVRI), Nasional
488.6.2	Radio
489	Sistem naskah sosialisasi kegiatan Gubernur/Bupati
489.1	Himpunan Naskah Sambutan
489.2	Klasifikasi Naskah Sambutan
489.3	Himpunan Dialog Interaktif
489.4	Himpunan Naskah Rubrik
489.5	Himpunan Naskah <i>Keynote Speaker</i>
489.6	Pembuatan kolom khusus hasil-hasil pembangunan

490	-
491	-
492	-
493	-
494	-
495	-
496	-
497	-
498	-
499	-
500	PEREKONOMIAN
500.1	Dewan Stabilitas
501	Pengadaan Pangan
502	Pengadaan Sandang
503	Pengadaan Papan
504	Perizinan pada umumnya, untuk perizinan sesuai Bidang, Klasifikasi pada masalahnya
505	-
506	-
507	-
508	-
509	-
510	PERDAGANGAN
	Klasifikasi disini: Tataniaga
510.1	Promosi perdagangan
510.1.1	Pekan Raya
510.1.2	Iklan
510.1.3	Pameran
510.1.4	Event-event
510.1.5	Lomba-lomba (Lomba Desain, Busana, Kerajinan)
510.1.6	Pasar
510.1.7	Pertokoan, kios, PKL
510.2	Pelelangan, Distribusi
510.2.1	Pemasaran Sembako
510.2.2	Pemasaran hasil Industri
510.2.3	Penentuan harga pokok
520.3	Bina usaha dan sarana perdagangan
520.3.1	Rencana dan Program kerja
520.3.2	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi
510.3.3	Pelaksanaan teknis
510.3.4	Pemantauan
510.3.5	Evaluasi pelaporan
510.4	Perijinan (HO, gangguan, Reklame)
510.4.1	Penerbitan, Perubahan SIUP
510.4.2	Penerbitan, Daftar ulang TDP
510.4.3	Persetujuan/Ijin arsip
510.4.4	Rekomendasi
510.5	Perdagangan antar pulau
510.5.1	Kerjasama bahan Baku
510.5.2	Industri pemasaran

510.6	Tera
510.6.1	Tera Ulang Ukuran
510.6.2	Takaran
510.6.3	Timbangan
510.6.4	Kalibrasi
510.6.5	Cap tanda tera
510.6.6	Biaya Tera
510.7	Bantuan Peralatan
510.7.1	Proposal
510.7.2	Surat perjanjian/kontrak
510.7.3	Serah terima
510.8	Perijinan/Rekomendasi Tanda Pabrik
510.9	Kemetrologian
510.9.1	Standart tingkat tiga
510.9.2	Standar kerja Satuan Ukuran
510.9.3	Ukuran metrology
510.9.3.1	Peralatan
510.9.3.2	Laboratorium Metrologi
510.9.3.3	Tanki Ukur Mobil
510.9.3.4	Meter Taxi
510.9.3.5	KWH Meter
510.9.3.6	SPBU
511	Pemasaran
511.1	Sembilan bahan pokok. Tambahkan kode wilayah beras, garam, minyak tanah, minyak goreng, sabun dan sebagainya
511.2	Pasar
511.3	Pertokoan, kaki lima, kios
511.4	Pusat perbelanjaan
512	Ekspor
512.1	Ekspor Hasil Industri
512.2	Ijin ekspor
512.3	Pengembangan Pasar Luar negeri
512.4	Managemen perdagangan Internasional
512.5	Eksport Hasil Industri
512.5.1	Kebijakan
512.5.2	Pemasaran
512.6	Pemberitahuan Eksport Barang
512.7	Pengawasan Mutu barang
512.8	Eksporir Terdaftar
512.9	Evaluasi dan Pelaporan
513	Import
513.1	Ijin Import
513.1.1	Pemberian Ijin
513.1.2	Pengendalian Ijin
513.2	Standart Mata Dagang Import
513.3	Managemen Perdagangan Internasional
513.4	Kegiatan Import
513.4.1	Pembinaan Import
513.4.2	Pengendalian Import
513.4.3	Pemantauan Import
513.5	Faktor-faktor Pendukung
513.6	Pengawasan mutu barang Import

513.7	Penyaluran Kegiatan Import
513.7.1	Bahan Konsumsi
513.7.2	Bahan baku
513.7.3	Bahan penolong
513.8	Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Import
514	Perdagangan Antar Pulau
514.1	Kerjasama Bahan Baku
514.2	Industri Pemasaran
514.3	Kontrak
515	Perdagangan Luar Negeri
515.1	Pengembangan Potensi Luar Negeri
515.1.1	Promosi dan Informasi
515.1.2	Pameran
515.1.3	Kerjasama
516	Pergudangan Termasuk tangki penyimpanan minyak goreng
516.1	Peti Kemas
516.2	Tangki Penyimpanan
517	Aneka Usaha perdagangan
518	KOPERASI
518.1	Bina Usaha Koperasi
518.1.1	Koperasi Pertanian
518.1.2	Koperasi non Pertanian
518.1.3	Permodalan Koperasi
518.1.3.1	Pemupukan Modal
518.1.3.2	Pemanfaatan Modal
518.1.3.3	Perbankan dan Asuransi
518.1.3.4	Permodalan Luar Koperasi
518.1.3.5	Kredit Program Umum
518.1.3.6	Kredit Program Khusus
518.1.4	Distribusi dan Jasa koperasi
518.1.4.1	Distribusi bahan Pokok
518.1.4.2	Distribusi Aneka Bahan
518.1.4.3	Distribusi Kerjasama Niaga
518.1.4.4	Jasa angkutan
518.1.4.5	Jasa perumahan
518.1.4.6	Aneka Jasa
518.1.5	Koperasi kelistrikan, Industri dan Telekomunikasi
518.2	Bina Lembaga Koperasi
518.2.1	Organisasi Koperasi
518.2.1.1	Anggaran dasar dan Akta Pendirian Koperasi
518.2.1.2	Pemberian Pembubaran Koperasi
518.2.1.3	Penyelesaian pembubaran Koperasi
518.2.1.4	Perangkaan Koperasi
518.2.1.5	Pengakuan Koperasi sekolah
518.2.1.6	Amalgamasi
518.2.1.7	Tertib Organisasi Koperasi
518.2.1.8	Penyelesaian Perselisihan/Persengketaan
518.2.1.9	Bimbingan Kesadaran Hukum
518.2.2	Bina Hubungan Alat Kelengkapan Organisasi Koperasi

518.2.2.1	Rapat Anggota Koperasi
518.2.2.2	Pengurus dan Badan Pemeriksa
518.2.2.3	Dewan Pengurus Koperasi Indonesia (DEKOPIN)
518.2.2.4	Badan Penasehat dan Pertimbangan Koperasi Unit Desa (BPP KUD)
518.2.3	Bina Tata Laksana Koperasi
518.2.3.1	Klasifikasi KUD/Koperasi Pedesaan
518.2.3.2	Klasifikasi Koperasi Perkotaan
518.2.3.3	Klasifikasi Koperasi Sekunder
518.2.4	Administrasi Ketatalaksanaan Koperasi
518.2.4.1	Administrasi Koperasi Pedesaan
518.2.4.2	Administrasi Koperasi Perkotaan
518.2.4.3	Karyawan / Manager Koperasi
518.2.4.4	Sumber Daya Manusia
518.2.4.5	Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST)
518.2.4.6	Penyahunan Alat Sekolah
518.2.4.7	Bantuan Pemda Kepada Koperasi / KUD
518.2.5	Akuntansi
518.2.5.1	Akuntansi KUD/ Koperasi Pedesaan
518.2.5.2	Akuntansi Koperasi Perkotaan
518.2.5.3	Akuntansi Koperasi Sekunder
518.2.6	Pengawasan Koperasi
518.2.6.1	Pengawasan Koperasi Primer
518.2.6.2	Pengawasan Koperasi Sekunder
518.2.6.3	Koperasi Jasa Audit
518.2.6.4	Kerjasama Kantor Akuntan
518.2.7	Penyuluhan Koperasi
518.2.7.1	Pembinaan Kader Koperasi
518.2.7.2	Masyarakat Umum
518.2.7.3	Forum Komunikasi
518.2.7.4	Kelompok Tani
518.2.7.5	Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PKKL)
518.2.7.6	Penilaian Tingkat Nasional
518.3	Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
518.3.1	Pembinaan Usaha
518.3.1.1	Pembinaan Usaha Mikro
518.3.1.2	Pembinaan Usaha Kecil
518.3.1.3	Pembinaan Usaha Menengah
518.3.2	Pengawasan Usaha
518.3.2.1	Pengawasan Usaha Mikro
518.3.2.2	Pengawasan Usaha Kecil
518.3.2.3	Pengawasan Usaha Menengah
519	

520

PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN

521	Tanaman Pangan
521.1	Rencana dan Program
521.1.1	Bimas/Imas Termasuk Kredit
521.1.2	Pelaporan dan evaluasi Pertanian
521.2	Produksi

521.2.1	Padi
521.2.2	Palawija
521.2.3	Hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias)
521.2.4	Panen Gagal (Puso)
521.3	Sarana Usaha Pertanian
521.3.1	Peralatan
521.3.2	Meliputi traktor dan sebagainya
521.3.3	Pembenihan dan pembibitan
521.3.4	Pupuk
521.3.5	Irigasi Pertanian
521.3.6	Rehabilitasi Lahan Pertanian
521.4	Perlindungan Tanaman
521.4.1	Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Pangan
521.4.1.1	Penyakit Tanaman Pangan
521.4.1.2	Hama tanaman pangan
521.4.2	Pemberantas
521.4.2.1	Pestisida
521.4.2.2	Agensia Pengendalian Hayati
521.4.3	Tanah Pertanian Pangan
521.4.3.1	Persawahan
521.4.3.2	Perladangan
521.4.3.3	Kebun
521.5	Pengusaha, Petani
521.6	Lahan kritis
521.7	Pemasaran dan Promosi Pertanian Pengembangan Sumber Daya Pertanian
521.8	
522	KEHUTANAN
522.1	Perencanaan Hutan
522.1.1	Survey
522.1.1.1	Survey PPA
522.1.1.2	Survey Areal
522.1.1.3	Survey Pembinaan Hutan
522.1.1.4	Survey Potensi Hutan
522.1.2	Pendataan/Inventarisasi Areal Hutan
522.1.2.1	Data Areal Tata Guna Hutan
522.1.2.2	Data Areal Konservasi
522.2	Tata Guna Hutan
522.2.1	Tata Ruang Kawasan
522.2.1.1	Pengurusan Kawasan Hutan
522.2.1.2	Penafsiran Hutan
522.2.1.3	Mutasi Hutan
522.2.2	Tata Hutan
522.2.2.1	Tata Hutan Sementara
522.2.2.2	Tata Hutan Tetap
522.2.2.3	Pembukaan Hutan
522.2.3	Pengukuran dan Pemetaan
522.3	Pengusahaan Hutan
522.3.1	Data Areal HPH

522.3.1.1	SK HPH
522.3.1.2	Kerja Sama
522.3.1.3	Pembatalan/ Penolakan
522.3.2	Modal dan Peralatan
522.3.2.1	Inventarisasi Logging
522.3.2.2	Inventarisasi Industri
522.3.2.3	Peralatan
522.3.2.4	Tenaga Kerja Pengusahaan Hutan
522.3.2.5	Pemegang Saham
522.3.2.6	Neraca Perusahaan
522.3.3	Rencana Kerja
522.3.3.1	KHPH
522.3.3.2	RKPH
522.3.4	Perpanjangan HPH
522.3.5	Produksi
522.3.5.1	Target Produksi
522.3.5.2	Produksi Kayu
522.3.5.3	Produksi Non-Kayu
522.3.6	Industri
522.3.6.1	Industri Kayu HPH
522.3.6.2	Industri Kayu Non-HPH
522.3.6.3	Industri Non Kayu
522.3.7	Pembinaan HPH
522.3.7.1	Pelanggaran dan Sanksi
522.3.8	Pembangunan Hutan Tanaman Industri
522.3.8.1	Hutan Tanaman Industri Pulp
522.3.8.2	HTI Pertukangan
522.3.9	Hutan Hutan
522.4	Sarana Usaha
522.4.1	Standarisasi
522.4.1.1	Kayu
522.4.1.2	Non Kayu
522.4.2	Pengujian Hasil Hutan
522.4.3	Pengembangan
522.4.3.1	Pengembangan Perusahaan
522.4.3.2	Pengembangan Pemasaran
522.4.4	Pemasaran Hasil Hutan
522.4.5	SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan), Angkutan Hasil Hutan
522.4.5.1	Sarana dan Prasarana
522.4.5.2	Pembinaan dan Peningkatan Daya Hutan
522.4.6	Tata Usaha Hasil Hutan
522.4.7	PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat)
522.5	Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam
522.5.1	Konservasi Jenis
522.5.1.1	Satwa yang Dilindungi
522.5.1.2	Satwa yang tidak dilindungi
522.5.1.3	Lembaga Konservasi Satwa
522.5.1.4	Lembaga Konservasi Tumbuhan

522.5.2	Kawasan Konservasi
522.5.2.1	Cagar Akam (termasuk Laut)
522.5.2.2	Suaka Margasatwa
522.5.2.3	Taman Wisata (Termasuk Laut)
522.5.2.4	Taman Nasional
522.5.2.5	Taman Hutan Raya
522.5.2.6	Taman Baru
522.5.2.7	Hutan Lindung
522.5.3	Pengkajian Lingkungan
522.5.3.1	Amdal UKL, UPL, Didalam Kawasan Hutan
522.5.3.2	Amdal UKL, UPL, Diluar Kawasan Hutan
522.5.4	Bina Cinta Alam
522.5.4.1	Kelompok Pecinta Alam
522.5.4.2	Kader Konservasi Sumber Daya Alam
522.5.4.3	Penyuluh Konservasi Sumber Daya Alam
522.5.4.4	LSM Lingkungan
522.5.5	Pengamanan Hutan
522.5.5.1	Jaga Wana
522.5.5.2	PPNS
522.5.5.3	Gangguan Keamanan lingkungan
522.5.5.4	Bencana Alam
522.5.5.5	Kebakaran Hutan
522.5.5.6	Sengketa Hutan
522.5.5.7	Hama dan Penyakit
522.5.5.8	Pestisida dan Pupuk Tanaman Hutan
522.5.5.9	Alat dan Mesin Kehutanan
522.6	Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan
522.6.1	Pembenihan
522.6.1.1	Tegakan Benih
522.6.1.2	Pengadaan Benih
522.6.1.3	Pengujian dan Penyimpanan Benih
522.6.1.4	Lalu Lintas dan Penyimpanan Benih
522.6.1.5	Pembibitan
522.6.1.6	Pengada dan Pengekar Bibit Bersertifikat
522.6.1.7	Pengada dan Pengekar Bibit Tidak Bersertifikat
522.6.2	Tanaman Reboisasi
522.6.2.1	Lahan Kritis
522.6.2.2	Reboisasi Lahan HPH
522.6.2.3	Rehabilitasi Tanah Hutan
522.6.2.4	Konservasi Tanah dan Air
522.6.2.5	Pengendalian Perladangan
522.6.2.6	Penghijauan
522.6.2.7	Aneka Usaha Kehutanan
522.6.3	Perhutanan Sosial
522.6.3.1	Sutera Hutan
522.6.3.2	Minyak Kayu Putih
522.6.3.3	Perlebahan
522.7	Hutan Produksi

522.7.1	Hutan Produksi Terbatas
522.7.2	Hutan Produksi yang dapat di Konservasi
522.8	Kawasan Lindung
523	PERIKANAN DAN KELAUTAN
523.1	Rencana, Program, Statistik, Prospek dan Pelaporan bidang Perikanan dan Kelautan
523.1.1	Penyuluhan
523.1.2	Teknologi
523.2	Produksi Perikanan
523.2.1	Standarisasi Mutu Hasil Perikanan
523.2.2	Perikanan Budidaya : CBIB, CBIC
523.2.3	Sertifikasi Kesehatan Ikan
523.3	Usaha Perikanan
523.3.1	Pelatihan Nelayan
523.3.2	Pembinaan Wanita Nelayan
523.3.3	Fasilitas Perijinan: SIUP, SIPI, SKP
523.3.4	Pembenihan
523.4	Pemasaran dan Pengolahan hasil Perikanan
523.4.1	Ekspor hasil Perikanan
523.4.2	Impor hasil Perikanan
523.4.3	Pemasaran Dalam Negeri
523.4.4	Pengusaha Perikanan
523.5	Sarana Perikanan
523.5.1	Pelabuhan Perikanan Pantai
523.5.2	TPI / PPI
523.5.3	Kesyahbandaran
523.5.4	Peralatan penangkapan: kapal, perahu, jaring, pump, dsb
523.6	Pengendalian Hama dan Penyakit
523.6.1	Penyakit Ikan
523.6.2	Hama Ikan
523.6.3	Obat-obatan termasuk Sertifikasinya
523.7	Konservasi dan Suaka Laut
523.7.1	Transplantasi Bibit Karang
523.7.2	Terumbu Karang
523.7.3	<i>Mangrove</i>
523.7.4	Garam
523.7.5	Harta Karun didalam Laut
523.7.6	Pembinaan/ Pendidikan masyarakat pesisir
524	PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
524.1	Produksi
524.1.1	Perbibitan
524.1.2	Penyebaran dan Pengembangan Peternakan
524.1.3	Budidaya
524.2	Usaha Peternakan
524.2.1	Pelayanan usaha
524.2.2	Pengolahan Hasil dan Pemasaran
524.2.3	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Peternakan
524.3	Kesehatan Hewan
524.3.1	Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan
524.3.2	Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan
524.3.3	Obat-obat Hewan
524.3.4	Pelayanan Kesehatan Hewan
524.4	Kesehatan masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Masyarakat
524.4.1	Zoonosis dan Kesehatan hewan
524.4.2	Hygini dan Sanitasi

524.4.3	Produk Hewani
524.5	Laboratorium Kesehatan hewan
524.5.1	Pengujian Mutu Asal Hewan
524.5.2	Pengujian Mutu Produk Bahan hasil Hewan
524.6	Inseminasi Buatan
524.6.1	Produksi Distribusi dan Pemasaran
524.6.2	Pemeliharaan ternak dan Pelayanan Reproduksi
524.7	Pembibitan dan Budi Daya Ternak
524.7.1	Ternak Non Ruminansia
524.7.2	Ternak Ruminansia
525	PERKEBUNAN
525.1	Program dan Pelaporan
525.1.1	Pelaporan
525.1.2	Monitoring
525.1.3	Statistik perkebunan
525.2	Produksi
525.2.1	Karet
525.2.2	Teh
525.2.3	Tembakau
525.2.4	Tebu
525.2.5	Cengkeh
525.2.6	Kelapa/Kopra/Kelapa sawit
525.2.7	Kopi
525.2.8	Kakao
525.2.9	Jenis Tanaman yang Lain
525.3	Usaha Perkebunan
525.3.1	Benih
525.3.2	Pembibitan
525.3.3	Kelompok tani
525.3.4	Kemitraan
525.3.5	Rekomendasi Ijin Usaha perkebunan
525.3.6	Pemasaran Hasil perkebunan
525.4	Perlindungan tanaman
525.4.1	Hama
525.4.2	Pestisida
525.4.3	Agensi Pengendalian hayati
525.5	Alat dan Mesin Perkebunan
525.5.1	<i>Power Sprayer</i>
525.5.2	<i>Hand Sprayer</i>
525.5.3	<i>Polibag</i>
525.5.4	Alat Laboratorium Lingkungan
525.5.5	<i>Reagen</i>
525.5.6	Sarana/ Alat produksi Perkebunan
525.6	Pengolahan Lahan
525.6.1	Terasering
525.7	Pemasyarakatan
525.7.1	Penyuluhan
525.7.2	Sosialisasi
525.7.3	Informasi
526	KETAHANAN PANGAN
526.1	Program Bimbingan Massal
526.2	Pengembangan Saran Sumber Daya
526.2.1	Pembinaan Teknologi

526.2.2	Sarana Produksi dan Permodalan
526.2.3	Kelembagaan
526.3	Agribisnis
526.3.1	Mutu Hasil
526.3.2	Pengelola Hasil Pangan
526.3.3	Pemasaran Hasil
526.3.4	Kementerian
525.4	Distribusi Pangan
526.4.1	Sistem dan Pola Distribusi
526.4.2	Sarana dan Prasarana Distribusi
526.4.3	Pengadaan dan Cadangan Pangan
526.5	Kewaspadaan dan Keanekaragaman Pangan
526.5.1	Rawan pangan, Keamanan dan Mutu Pangan
526.5.2	Pola Konsumsi Pangan Masyarakat
526.5.3	Sistem Informasi Pangan
527	PENYULUHAN
527.1	Sumber Daya Manusia
527.1.1	Penyuluh
527.1.2	Pelaku Utama Pelaku Usaha
527.1.3	<i>Stake holder</i>
527.2	Kelembagaan
527.2.1	Struktural
527.2.2	Non Struktural
527.2.3	Pelaku Utama Pelaku Usaha
527.2.4	Lembaga Profesi
527.3	Penyelenggaraan Penyuluhan
527.3.1	Program / Metode
527.3.2	Promosi/ Pameran/Kampanye
527.3.3	Penghargaan / Lomba
527.3.4	Materi
528	-
529	-
530	PERINDUSTRIAN
530.1	Undang-undang Gangguan
531	Industri Logam
532	Industri Mesin / Elektronik
533	Industri Kimia / Farmasi
534	Industri Tekstil
535	Industri Makanan / Minuman
536	Aneka Industri / Perusahaan
536.1	<i>Home</i> Industri
537	Aneka Kerajinan
537.1	Kerajinan Rakyat
538	Usaha Negara (BUMN)
538.1	Perjan
538.2	Perum
538.3	Persero
539	Perusahaan Daerah
540	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
541	Minyak dan Gas Bumi

541.1	Pengusahaan
541.1.1	Perijinan
541.1.2	Rekomendasi
541.1.3	Kontrak Karya
541.1.4	Pengolahan
541.2	Penyaluran
541.3	Tangki, Pompa, Tanker
542	Energi
542.1	Energi alternatif
542.1.1	Gas Rawa
542.1.2	Bahan bakar Nabati (<i>Biofuel</i>)
542.1.3	Biogas
542.1.4	Energi Baru terbarukan
542.1.5	Perijinan
542.1.6	Rekomendasi
542.1.7	Pembinaan dan pengawasan
542.2	Konservasi Energi
542.3	Pemetaan Energi
542.4	Rencana Umum Perencanaan Energi Daerah (RUPED)
543	Pertambangan, mineral, dan Batubara
543.1	Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP)
543.1.1	WIUP Bantuan
543.1.2	WIUP Bukan Logam
543.1.3	WIUP Logam
543.1.4	WIUP Batu Bara
543.2	Rekomendasi Teknis
543.3	Perijinan
543.3.1	IUP Eksplorasi
543.3.2	IUP Operasi Produksi
543.3.3	IUP Operasi Produksi Khusus
543.3.4	Ijin Usaha Jasa pertambangan
543.3.5	Pencabutan Ijin
543.4	Pembinaan
543.5	Pengawasan
543.5.1	Pengawasan Usaha Pertambangan
543.5.2	Penerbitan Kegiatan Pertambangan
543.6	Pasca Tambang
543.6.1	Reklamasi
543.6.2	Penutupan
544	Air Tanah
544.1	Cekungan Air Tanat (CAT)
544.1.1	Pemetaan CAT
544.1.2	Imbuhan CAT
544.1.3	Lepasan CAT
544.1.4	Konservasi
544.1.5	Pengendalian Daya Rusak
544.2	Rekomendasi Teknis
544.3	Sumur Artesis
544.4	Sumur Bor
544.5	Sumur Gali (Pasak)
544.6	Pengusaha Pengebor (APATINDO)
544.7	Sumur Pantau

544.8	Harga Dasar Air/ Nilai Perolehan Air
544.9	Hidrologi
545	Geologi
545.1	Pemetaan
545.2	Mitigasi Bencana Geologi
545.3	Vulkanologi
545.3.1	Pengawasan Vulkanologi
545.3.2	Panas Bumi
545.4	Hidrogeologi
545.5	Gerakan tanah (Longsor, Amblesan)
545.6	Pengawasan, Pengendalian
546	Hidrologi
547	Kesamudraan
548	Penghematan energi
549	
550	PERHUBUNGAN
551	Perhubungan Darat
551.1	Lalu Lintas Jalan Raya, Sungai, Danau
551.1.1	Kecelakaan Lalu Lintas, Rambu-Rambu
551.1.2	Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor (Keur)
551.1.3	Kecelakaan Lalu Lintas
551.2	Angkutan Jalan Raya
551.2.1	Perizinan
551.2.2	Terminal
551.2.3	Alat Angkutan
551.2.4	Jembatan Timbang/Lebih Muatan
551.2.5	Uji Mutu
551.3	Angkutan Sungai
551.3.1	Keselamatan, Rambu-Rambu
551.3.2	Lalu Lintas
551.3.3	Alur dan Kolom Pelabuhan
551.3.4	Trayek
551.3.5	Sarana/Kapal
551.3.6	Pelabuhan
551.3.7	Terminal
551.3.8	Kecelakaan
551.3.9	Perizinan
551.4	Angkutan Danau
551.4.1	Keselamatan, Rambu-Rambu
551.4.2	Lalu Lintas
551.4.3	Alur dan Kolom Pelabuhan
551.4.4	Trayek
551.4.5	Sarana / Kapal
551.4.6	Pelabuhan
551.4.7	Terminal
551.4.8	Kecelakaan
551.4.9	Perizinan
551.5	Feri
551.5.1	Sarana dan Prasarana / Kapal
551.5.2	Terminal
551.5.3	Pelabuhan

551.5.4	Trayek
551.5.5	Angkutan Penumpang, Angkutan Barang
551.5.6	Keselamatan
551.5.7	Kecelakaan
551.5.8	Perawatan / Perbaikan
551.5.9	Perizinan
551.6	Perkereta-apian
551.6.1	Sarana Meliputi Lokomotif: Gerbong, <i>Bogie</i>
551.6.2	Prasarana (Jalan/Jembatan)
551.6.3	Trayek
551.6.4	Angkutan Penumpang
551.6.5	Angkutan Barang
551.6.6	Keselamatan
551.6.7	Kecelakaan
551.6.8	Perawatan/Perbaikan
551.6.9	Perizinan
552	Perhubungan Laut
552.1	Lalu Lintas Angkutan Laut
552.1.1	Pelayaran dalam Negeri
552.1.2	Pelayaran Luar Negeri
552.1.3	Pelayaran Haji
552.1.4	Pelayaran Charter/ Wisata Turis
552.1.5	Pelayaran Khusus
552.1.6	Keamanan Lalu Lintas, Rambu-Rambu
552.2	Perkapalan - Alat Angkutan
552.2.1	Kapal Penumpang
552.2.2	Kapal Barang
552.2.3	Kapal Perang/Patrol/ Negara
552.2.4	Kapal tenker
552.2.5	Ponton/Tongkang
552.2.6	Kapal Layar
552.2.7	Kapal Layar Motor
552.2.8	Kapal Kontainer
552.3	Pelabuhan
552.3.1	Tanah / Lokasi
552.3.2	Alur layar
552.3.3	Dermaga
552.3.4	Terminal penumpang
552.3.5	Terminal Kontainer
552.3.6	Bangunan/Gedung/Gudang
552.3.7	Perlengkapan Tambat labuh
552.3.8	Lapangan Penumpukan
552.3.9	Pelabuhan Khusus/Dermaga Khusus
552.4	Pengerukan / Perawatan
552.4.1	Alur Pelayaran
552.4.2	Kolam Pelabuhan
552.4.3	Reklamasi Pantai
552.4.4	Dumping Area
552.4.5	Pekerjaan Bawah Air (<i>Salvage</i>)
552.5	Penjagaan Pantai
552.5.1	Patroli Bandar
552.5.2	Patroli Perairan

552.5.3	Penjagaan Pantai & Penanggulangan Keselamatan di Laut (GAMAT)
552.6	Angkutan Barang
552.6.1	Pos
552.6.2	Minyak
552.6.3	Log
552.6.4	Ternak
552.6.5	Sembilan Bahan Pokok
552.6.6	Peti Kemas / EMKL
552.6.7	Muatan Umum
552.6.8	Barang Dalam Negeri, Barang Luar Negeri
552.6.9	Bongkar Muat
552.7	Keselamatan
552.7.1	Rambu-Rambu/ Mercu Suar
552.7.2	Kelaikan Kapal / Pembangunan Kapal
552.7.3	Fasilitas Keselamatan / Keamanan
552.7.4	Telekomunikasi Pelayaran
552.7.5	Sertifikasi Kesempurnaan Kapal
552.7.6	Sertifikasi Awak Kapal
552.8	Kecelakaan Gangguan
552.8.1	Kecelakaan Penumpang / Kapal
552.8.2	Kecelakaan Barang
552.8.3	Gangguan Sarana / Prasarana
552.8.4	Pembajakan / Penyelundupan
552.8.5	Pencemaran
552.9	Perijinan
552.9.1	Ijin Berlayar
552.9.2	Ijin Pekerjaan Bawah Air Ijin Pembuatan dan Perubahan Bentuk Kapal
552.9.3	Ijin Pembukaan Kantor Cabang
552.9.4	Ijin Usaha Angkutan Laut
552.9.5	Ijin Usaha Penunjang Angkutan Laut
552.9.6	Ijin Pelayanan Jasa Kepelabuhan
552.9.7	Ijin Pembangunan Pelabuhan khusus
552.9.8	Ijin Pembangunan Dermaga Khusus
552.9.9	Ijin Pembangunan Dermaga Khusus
553	PERHUBUNGAN UDARA
553.1	Lalu Lintas Angkatan Udara
553.1.1	Penerbangan Domestik
553.1.2	Penerbangan Luar Negeri
553.1.3	Penerbangan Haji
553.1.4	Penerbangan Charter / Non Reguler
553.1.5	Penerbangan Khusus/ Jembatan Udara
553.2	Pelabuhan Udara
553.2.1	Tanah/Lokasi
553.2.2	Landasan
553.2.3	Apron
553.2.4	Terminal Penumpang
553.2.5	Terminal Cargo
553.2.6	Bangunan / Gedung

553.2.7	Perlengkapan
553.2.8	Parkir Kendaraan
553.3	Alat Angkutan
553.3.1	Pesawat Udara
553.3.2	Helikopter
553.4	Angkutan Barang
553.4.1	Pos
553.4.2	Muatan Dalam Negeri
553.4.3	Muatan Luar Negeri
553.4.4	EMPU
553.5	Sertifikasi Kelayakan
553.5.1	Kelaikan Pesawat Udara
553.5.2	Kelaikan Peralatan Penunjang
553.5.3	Kelaikan Personil / awak kapal
553.5	Keselamatan
553.6.1	Rambu-Rambu
553.6.2	Perakitan / Kalibrasi
553.6.3	Fasilitas Keselamatan
553.6.4	Telekomunikasi Penerbangan
553.7	Kecelakaan / gangguan
553.7.1	Kecelakaan Penumpang
553.7.2	Kecelakaan Barang
553.7.3	Gangguan Sarana / Prasarana
553.7.4	Pembajakan
553.7.5	Pencemaran
553.8	Umum
553.8.1	Asuransi
553.8.2	Asosiasi
553.8.3	SATPAM
554.8.4	Rally Udara / Lomba
553.9	Perizinan
553.9.1	Izin Terbang / <i>Flight Approval</i>
553.9.2	Usaha Kegiatan Penunjang Penerbangan / EMPU
553.9.3	Pembukaan Kantor Cabang
554	POS
554.1	Pembinaan
554.1.1	Kebutuhan Fasilitas
554.1.2	Rehabilitasi / Perawatan
554.1.3	Bina Usaha / Pengawasan / Penerbitan
554.1.4	Standarisasi Perangkat
554.1.5	Tanah / Bangunan
554.1.6	Filateli
554.1.7	Asosiasi
554.1.8	Laporan dan Evaluasi
554.2	Pelayanan
554.2.1	Jasa Pos
554.2.2	Jasa Titipan
554.2.3	Jasa Giro
554.2.4	Benda pos / Perangkat
554.2.5	Sampul Peringatan
554.2.6	Jasa Pos Elektronik
554.3	Perijinan

554.3.1	Rekomendasi Usaha Jasa Pos / Titipan
554.3.2	Pembukaan agen / Cabang
554.4	Gangguan Sarana dan Prasarana
554.4.1	Kecelakaan
554.4.2	Sabotase
	Penyelundupan
554.4.3	
555	TEKNOLOGI INFORMASI
555.1	Kebijakan
555.2	Peralatan
555.2.1	Telepon
555.2.2	Internet/USO
555.2.3	Telegram, Telex/SBB, <i>Faximile</i>
555.2.4	Satelit, stasiun Bumi
555.2.5	Radio Komunikasi
555.3	Sistem
555.4	Pembinaan / penertiban
555.5	Perijinan
556	PARIWISATA DAN REKREASI
556.1	Usaha pariwisata
556.1.1	Usaha Jasa Pariwisata
556.1.1.1	Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata
556.1.2	Ijin Usaha Obyek dan Atraksi Wisata
556.1.3	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata
556.1.4	Usaha Sarana Pariwisata
556.1.4.1	Ijin Pariwisata
556.1.4.2	Ijin Usaha Pariwisata
556.1.4.3	Ijin Usaha Jasa Pariwisata
556.1.4.4	Ijin Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata
556.1.4.5	Ijin Usaha Sarana
556.1.5	Wisatawan
556.1.5.1	Wisatawan Nusantara
556.1.5.2	Wisatawan Mancanegara
556.1.6	Promosi dan Informasi pariwisata
556.1.6.1	Dalam Negeri
556.1.6.2	Luar Negeri
556.2	Perhotelan
556.2.1	Status Hotel
556.2.2	Kelas Hotel
556.2.3	Tarif
556.3	<i>Travel service</i>
556.3.1	Pramu Wisata
556.3.2	Biro Perjalanan / Angkutan wisata
556.3.3	Souvenir
556.3.4	Kemudahan Wisata (Visa, Bea Cukai, Karantina)
556.4	Tempat Rekreasi :
556.4.1	Obyek dan Daya Tarik Wisata
556.4.1.1	Ciptaan Tuhan
556.4.1.2	Hasil Karya Manusia
556.4.2	Rehabilitasi / Perawatan
556.4.3	Pengembangan fasilitas

556.4.4	Tanah / Bangunan
556.4.5	Bina Usaha
556.4.6	Institusi
556.4.6.1	Asosiasi
556.4.6.2	Lembaga Kepariwisata

557

557.1	Curah hujan
557.2	Hujan Buatan
557.3	Pengeropongan Bintang

558

559

560

METEREOLOGI

TENAGA KERJA

560.1	Data Permintaan TKI/TKW dari Luar Negeri
560.1.1	Data Persediaan TKI/TKW dari Daerah
560.2	Job Order TKI Ke Luar Negeri oleh PJTKI
560.3	Rekrutmen Calon TKI/TKW
560.4	Seleksi Naker Ke Luar Negeri
560.4.1	Pendaftaran dan Seleksi Calon TKI/TKW
560.4.2	Berkas Persyaratan Calon TKI/TKW
560.4.3	Pemeriksaan dan Hasil Cek Kesehatan TKI/TKW
560.5	Persyaratan Naker TKI/TKW
560.5.1	Permohonan Rekomendasi Pasport
560.5.2	Perjanjian Kerja TKI/TKW
560.5.3	Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI)
560.5.4	Permohonan Fiskal Ke Luar Negeri
560.5.5	Pelatihan TKI/TKW
560.6	Pemberangkatan Naker
560.6.1	Pemberangkatan Ke Luar Negeri
560.6.2	Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI/TKW Ke Luar Negeri
560.6.3	Berita Acara Serah Terima TKI/TKW
560.7	Pemulangan Naker
560.7.1	Keputungan TKI/TKW Karena kontraknya Habis
560.7.2	Pemulangan TKI/TKW ilegal
560.7.3	TKI/TKW Terkena Kasus Pidana
561	Upah
561.1	Kegiatan dan Hasil Sidang Dewa Penelitian Pengupahan Daerah/Nasional
561.2	Permohonan Penanggulangan Pelaksanaan Pembayaran Upah Minimum Kabupaten/kota dan Provinsi
561.3	Kebutuhan Fisik Minimum
561.4	Perhitungan Upah Kerja (termasuk didalamnya upah lembur)
561.5	Laporan Data Remittance
561.6	pembayaran Gaji/Upah TKI/TKW
562	Penempatan Tenaga Kerja
562.1	Penempatan Naker Mandiri Terdidik (TKMT)
562.1.1	Penempatan Naker Mandiri Profesional (TKMP)
562.1.2	Penempatan Naker Non Terdidik dan Non Profesional
562.1.3	Pengembangan Kesempatan Berusaha/Perluasan Kerja
562.2	Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)
562.3	Lembaga Penyalur Naker

- 562.3.1 Ijin Pendirian Lembaga Penyalur Naker Antar Kerja Lokal/Daerah dan Antar Kerja Negara (AKAN)
- 562.3.2 Data Evaluasi Kinerja Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI/BKS/BKK)
- 562.3.3 Pencabutan Ijin Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI, BKK, BKS)
- 563 Latihan Kerja
 - 563.1 Pendidikan Pekerja
 - 563.1.1 Pendidikan dan Latihan Kerja
 - 563.1.2 Diklat Di Dalam Negeri (PKL, Prakerin, OJT)
 - 563.1.3 Diklat Di Luar Negeri (Pemagangan)
 - 563.2 Sarana dan Prasarana Latihan Kerja
 - 563.2.1 Tempat Pelatihan (BLK)
 - 563.2.2 Instruktur/ Pelatihan
 - 563.2.3 Modul/Silabus dan Bahan Praktek
 - 563.2.4 Kurikulum Pelatihan Tenaga Kerja
 - 563.2.5 Sertifikat
 - 563.3 Kerjasama Pelatihan Tenaga Kerja
- 564 Tenaga Sukarela
 - 564.1 Butsi
 - 564.2 Padat Karya
- 565 Perselisihan Perburuhan
 - 565.1 Peselisihan dan Perkara Hukum Naker
 - 565.1.1 Pengaduan Perkara Perburuhan / NAKER
 - 565.1.2 Pemeriksaan Perkara Perburuhan / NAKER
 - 565.1.3 Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Perburuhan / NAKER
 - 565.1.4 Sidang Perkara Perselisihan Perburuhan / NAKER
 - 565.1.5 Hasil Putusan Sidang Perkara Perselisihan Perburuhan (NAKER)
 - 565.1.6 Peninjauan Kembali Hasil Putusan Sidang KP2K (P4D / P4P)
 - 565.1.7 Permintaan Eksekusi Terhadap hasil Keputusan KP2k (P4D / P4P)
 - 565.1.8 Daftar usulan, Susunan dan Penepatan Anggota KP2K (P4D / P4P)
 - 565.2 Pemogokan / Unjuk Rasa Tenaga Kerja
- 566 Keselamatan Kerja
 - 566.1 Instalasi Proteksi Kebakaran
 - 566.2 Pemakaian Alat Keselamatan Kerja
 - 566.3 Keterangan Kelayakan atau Pelindung Diri (APD) dalam bekerja
 - 566.4 Pengangkatan dan Pembinaan Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 566.5 Pelatihan/Pembinaan *Hyperkes* dan Keselamatan Kerja
 - 566.6 Pengujian dan Hasil Pemeriksaan *Hyperkes*
 - 566.7 Gangguan Lingkungan Tempat Usaha
 - 566.8 Perlengkapan Sarana Kerja
 - 566.8.1 Pemasangan dan Pemakaian Lift (Pesawat angkat /angkut)
 - 566.8.2 Pemasangan dan Pemakaian Pesawat Uap (ketel uap)
 - 566.8.3 Pemasangan dan Pemakaian Motor Diesel
 - 566.8.4 Pemasangan dan Pemakaian Tanki Tak Bertekanan

566.8.5	Pemasangan dan Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran
566.9	Ijin Tenaga Kerja Wanita Masuk Malam Hari (sip malam)
567	Pemutusan Hubungan Kerja
567.1	Pengaduan PHK Sepihak
567.2	PHK Masal
567.3	Bantuan hukum Bagi Pekerja yang di PHK
567.4	Ijin Melakukan PHK
567.5	Penghitungan Masa Kerja Bagi Pekerja yang Di PHK
567.6	Pemberian Uang Tunggu Bagi Pekerja yang di PHK
567.7	Pemberian Uang Pesangon Bagi Pekerja Yang Di PHK
568	Kesejahteraan Buruh
568.1	Bantuan Kredit / Bantuan Modal Kerja Bagi Naker
568.1.1	Pemilihan Pekerja Teladan
568.2	Perumahan Pekerja
568.3	Keikutsertaan Pekerja Dalam Program Jamsostek
568.4	Koperasi Pekerja
568.5	Sarana Transportasi Pekerja
568.6	Perpustakaan Pekerja
568.7	Tempat Ibadah Pekerja
568.8	Rekreasi dan Olahraga Pekerja
568.9	Pendirian, Pendaftaran, dan Kegiatan Organisasi Pekerja
568.9.1	Lembaga Kerjasama Bipartid
569	Tenaga Kerja Orang Asing
569.1	Rekomendasi Perpanjangan Ijin Kerja Asing (IKTA)
569.2	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
569.3	Kualifikasi Keahlian Tenaga Kerja Asing
569.4	Perjanjian Kerja Dengan Negara Asing
569.5	Data tenaga Kerja Asing
569.6	Kecelakaan / Kematian Tenaga Kerja Asing
569.7	Pemulungan Tenaga Kerja Asing
569.8	Pemberdayaan dan Kontribusi Tenaga Kerja Asing
569.9	Tenaga Kerja Asing Ilegal
570	PENANAMAN MODAL
570.1	Kerjasama Penanaman Modal Antar Provinsi
570.2	Kerjasama Penanaman Modal Antar Kabupaten
571	Modal Asing
572	Modal Patungan (<i>joint Venture</i>) / Penyertaan Modal
573	Pasar Uang dan Modal
574	Saham
575	-
576	-
577	-
578	-
579	-
580	PERBANKAN MONETER
581	Kredit
582	Investasi
583	Tabungan
583.1	Deposito
583.2	Tabanas
583.3	Taska
583.4	tepelpram

584	Lembaga Keuangan
584.1	Bank
584.2	BPR BKK/BKK
585	Asuransi
585.1	Dana Kecelakaan lalu lintas
585.2	Polis
585.3	Premi
585.4	Tertanggung/pemegang polisi
585.5	Uang pertanggungan
586	Alat pembayaran
	<i>Check, giro wesel, transfer</i>
587	Fiscal
588	Hutang Negara Obligasi
589	Moneter
590	AGRARIA
591	Tata Guna Tanah
591.1	Pemetaan dan pengukuran
591.2	Perpetaan
591.3	Penyediaan data, peta, dan Publikasi
591.4	Fakta tata guna tanah
591.5	Tanah Kritis
592	<i>Landreform</i>
592.1	Reditribusi
592.1.1	Pendaftaran pemilikan dan pengurusan tanah pertanian
592.1.2	Penentuan tanah obyek <i>Landreform</i>
592.1.3	Pembagian tanah obyek <i>Landreform</i>
592.1.4	Sengketa Redistribusi Tanah Obyek <i>Landreform</i>
592.2	Ganti rugi
592.2.1	Ganti rugi tanah kelebihan
592.2.2	Sengketa ganti rugi tanah kelebihan
592.2.3	Ganti rugi tanah <i>Absentee</i>
592.2.4	Sengketa Ganti rugi tanah <i>Absentee</i>
592.2.5	Ganti rugi tanah Partikelir
592.2.6	Sengketa ganti rugi tanah Partikelir
592.3	Bagi Hasil
592.3.1	Penetapan Imbangan Bagi Hasil
592.3.2	Pelaksanaan perjanjian bagi hasil
592.3.3	Sengketa perjanjian bagi hasil
592.4	Gadai tanah
592.4.1	Pendaftaran pelaksanaan gadai tanah
592.4.2	Pelaksanaan gadai tanah
592.4.3	Sengketa gadai tanah
592.5	Bimbingan dan Penyuluhan
592.6	Pengembangan
592.7	Yayasan dana <i>Landreform</i> (Y D L)
593	Pengurusan hak-hak tanah
593.1	Penyusunan Program dan bimbingan teknis
593.1.1	Sewa Tanah
593.1.1.1	Sewa tanah untuk tanaman tertentu : Tebu, tembakau, <i>Rosela, Corhorus</i>

593.2	Hak milik
593.2.1	Perorangan
593.2.2	Badan Hukum
593.3	Hak pakai
593.3.1	Perorangan
593.3.1.1	Warga Negara Indonesia
593.3.1.2	Warga Negara Asing
593.3.2	Badan Hukum
593.3.2.1	Badan Hukum Indonesia
593.3.2.2	Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat, Kantor Dagang Asing
593.3.3	Tanah Gedung-gedung Negeri
593.4	Guna Usaha
593.4.1	Perkebunan Besar
593.4.2	Perkebunan Rakyat
593.4.3	Peternakan
593.4.4	Perikanan
593.4.5	Kehutanan
593.5	Hak Guna bangunan
593.5.1	Perorangan
593.5.2	Badan hukum
593.5.3	P3MB (Panitia Pelaksana Pengusahaan Milik Belanda)
593.5.4	Badan Hukum Asing Belanda- PBK No.5/65
593.5.5	Pemulihan Hak (Pen Pres 4 / 1960)
593.6	Hak pengelolaan
593.6.1	PN Perumnas <i>Bonded were House, Industrial estate, Real estate</i>
593.6.2	Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan
593.7	Sengketa Tanah
593.7.1	Peradilan Perkara Tanah (lihat juga 183)
593.8	Pencabutan dan Pembebasan Tanah
593.8.1	Pencabutan Hak
593.8.2	Pembebasan Tanah
593.8.3	Ganti Rugi Tanah
594	Pendaftaran Tanah
594.1	Pengukuran / Pemetaan
594.1.1	Fotogrametri
594.1.2	Terristris
594.1.3	Triangulasi
594.1.4	Peralatan
594.2	Dana Pengukuran (Permen Agraria No. 6/ 1960)
594.3	Sertifikat
594.4	pejabat Pembuat Akte Tanah
595	Transmigrasi
595.1	Tata guna Tanah
595.2	Landreform
595.3	pengurusan Hak-hak Tanah
595.4	Pendaftaran Tanah
596	-
597	-
598	-

600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
601	Tata Bangunan konstruksi, industri konstruksi
602	Jasa Konstruksi
603	Arsitektur
604	Bahan Bangunan
604.1	Tanah dan Batu
604.2	Aspal
604.3	Besi dan Logam lainnya
604.3.1	Besi beton
604.3.2	Besi profil (konstruksi)
604.3.3	Paku
604.3.4	Aluminium Profil
604.4	Bahan-bahan perlindungan dan Pengawet (cat, <i>teck oil</i> , pengawet kayu)
604.5	Semen
604.6	Kayu
604.7	Bahan penutup atap
604.8	Alat-alat penggantung dan pengunci
604.9	Bahan-bahan bangunan Lainnya
605	Instalansi
605.1	Instalansi Cahaya / Penerangan
605.2	Instalansi bangunan
605.3	Instalansi listrik
605.4	Instalansi air / sanitasi
605.5	Instalansi pengatur udara
605.6	Instalansi akustik
606	Konstruksi pencegahan
606.1	Konstruksi pencegahan terhadap kebakaran
606.2	Terhadap gempa
606.3	Terhadap angin / udara / panas
606.4	Terhadap kegaduhan
606.5	Terhadap gas / <i>explosive</i>
606.6	Terhadap serangga
606.7	Terhadap radiasi atom
607	Jasa Konsultan
608	-
609	-
610	PENGAIRAN
611	Irigasi
611.1	Bangunan /Waduk
611.1.1	Bendungan
611.1.2	Tanggul
611.1.3	Pelimpahan banjir
611.1.4	Menara pengambilan
611.1.5	Pembangunan dermaga
611.2	Bangunan Pengambilan
611.2.1	Bendung
611.2.2	Bendung dengan pintu bilas

611.2.3	Bendung dengan pompa
611.2.4	Pengambilan Bebas
611.2.5	Pengambilan bebas dengan pompa
611.2.6	Sumur dengan Pompa
611.2.7	Kantung Lumpur
611.2.8	<i>Sif Ekstretor</i>
611.2.9	<i>Escape chanel</i>
611.3	Bangunan Pembawa
611.3.1	Saluran
611.3.1.1	Saluran Induk
611.3.1.2	Saluran Sekunder
611.3.1.3	Suplesi
611.3.1.4	Tersier
611.3.1.5	Saluran kwarter
611.3.1.6	Saluran pasangan
611.3.1.7	Saluran tertutup / terowongan
611.3.2	Bangunan
611.3.2.1	Bangunan bagi
611.3.2.2	Bangunan bagi dan sadap
611.3.2.3	Bangunan sadap
611.3.2.4	Bangunan <i>check</i>
611.3.2.5	Bangunan Terjun
611.3.3	Bak Tersier
611.3.4	Got miring
611.3.5	Talang
611.3.6	<i>Syphon</i>
611.3.7	Gotong royong
611.3.8	Pelimpahan Samping
611.4	Bangunan Pembuangan
611.4.1	Saluran
611.4.1.1	Saluran pembuang Induk
611.4.1.2	Saluran Pembuang Sekunder
611.4.1.3	Saluran Pembuang Tersier
611.4.2	Bangunan
611.4.2.1	Bangunan <i>Outlet</i>
611.4.2.2	Bangunan Terjun
611.4.2.3	Bangunan Penahan Banjir
611.4.3	Gotong-royong Pembuang
611.4.4	Talang Pembuang
611.4.5	<i>Syphon</i> pembuang
611.5	Bangunan lainnya
611.5.1	Jalan
611.5.1.1	Jalan inspeksi
611.5.1.2	Jalan Logistik
611.5.2	Jembatan
611.5.2.1	Jembatan Inspeksi
611.5.2.2	Jembatan hewan
611.5.3	Tangga cuci
611.5.4	Kubangan kerbau
611.5.5	Waduk lapangan
611.5.6	Bangunan Penunjang

611.5.7	Jaringan telepon
611.5.8	Stasiun Agro
611.5.9	Bangunan TPI dari Pasar Ikan
612	Polder
612.1	Tanggul keliling
612.1.1	Tanggul
612.1.2	Bangunan penutup sungai
612.1.3	Jembatan
612.2	Bangunan Pembawa
612.2.1	Saluran
612.2.1.1	Saluran muka
612.2.1.2	Saluran pembawa induk
612.2.1.3	Saluran Pembawa sekunder
612.2.1.4	Saluran Stasiun Pompa Pemasukan
612.2.2	Bangunan Bagi
612.2.2.1	Gotong-royong
612.2.2.2	Syphon
612.3	Bangunan pembuang
612.3.1	Stasiun Pompa Pembuangan
612.3.2	Saluran
612.3.2.1	Saluran pembawa induk
612.3.2.2	Saluran pembawa sekunder
612.3.3	Pintu air pembuangan
612.3.4	Gotong-royong Pembuangan
612.3.5	Syphon Pembuangan
612.4	Bangunan Lainnya
612.4.1	Bangunan
612.4.1.1	Bangunan Pengukur air
612.4.1.2	Bangunan pengukur curah hujan
612.4.1.3	Bangunan Gudang Stasiun Pompa
612.4.1.4	Bangunan Listrik Stasiun Pompa
612.4.2	Rumah Petugas Eksploitasi
613	Pasang Surut
613.1	Bangunan Pembawa
613.1.1	Saluran
613.1.1.1	Saluran Pembawa Induk
613.1.1.2	Saluran Pembawa sekunder
613.1.1.3	Saluran Pembara Tersier
613.1.1.4	Saluran Penyimpanan Air
613.1.1.5	Bangunan Pintu Pemasukan
613.2	Bangunan Pembuang
613.2.1	Saluran
613.2.1.1	Saluran Pembawa Induk
613.2.1.2	Saluran Pembawa Sekunder
613.2.1.3	Saluran Pembawa Tersier
613.2.1.4	Saluran Penyimpanan Air
613.2.1.5	Bangunan Pintu Pembuangan
613.3	Bangunan Lainnya
613.3.1	Kolom Pasang
613.3.2	Saluran

613.3.2.1	Saluran Lalu Lintas
613.3.2.2	Saluran Muka
613.3.3	Bangunan
613.3.3.1	Bangunan penangkis Kotoran
613.3.3.2	Bangunan Pengukur Muka air
613.3.3.3	Bangunan Pengukur curah hujan
613.3.4	Jalan
613.3.5	Jembatan
614	Pengendalian sungai
614.1	Bangunan Pengaman
614.1.1	Tanggul Banjir
614.1.2	Pintu Pengatur Banjir
614.1.3	Klep Pengatur banjir
614.1.4	Tembok Pengaman Talut
614.1.5	Krib
614.1.6	Kantong Lumpur
614.1.7	<i>Cheek Dam</i>
614.1.8	<i>Syphon</i>
614.2	Saluran Pengaman
614.2.1	Saluran Banjir
614.2.2	<i>Saluran Drainase</i>
614.2.3	<i>Corepure</i>
614.3	Bangunan Lainnya
614.3.1	Warning system
614.3.2	Stasiun
614.3.2.1	Stasiun pengukur Curah Hujan
614.3.2.2	Stasiun pengukur Air
614.3.2.3	Stasiun pengukur cuaca
614.3.2.4	Stasiun pos Penjagaan
615	Pengaman Pantai
615.1	Tanggul
615.2	Krib
615.3	Bangunan Lainnya
616	Air tanah
616.1	Stasiun Pompa
616.2	Bangunan Pembawa
616.3	Bangunan Pembuang
616.4	Bangunan Lainnya
617	-
618	-
619	-
620	JALAN
621	Jalan Kota
621.1	Daerah Penguasaan
621.1.1	Tanah
621.1.2	Tanaman
621.1.3	Bangunan
621.2	Bangunan Sementara
621.2.1	Jalan Sementara
621.2.2	Kantor Proyek
621.2.3	Gedung Proyek
621.2.4	Barak Kerja

621.2.5	Laboratorium Lapangan
621.2.6	Rumah
621.3	Badan Jalan
621.3.1	Pekerjaan Tanah (<i>earth work</i>)
621.3.2	Stabilisasi
621.4	Perkerasan
621.4.1	Lapisan Pondasi Bawah
621.4.2	Lapisan Pondasi
621.4.3	Lapisan permukaan
621.5	<i>Drainage</i>
621.5.1	Parit Tanah
621.5.2	Gotong-royong (<i>culvert</i>)
621.6	Buku Trotoir
621.6.1	Tanah
621.6.2	Perkerasan
621.6.3	Pasangan
621.7	Medium
621.7.1	Tanah
621.7.2	Tanaman
621.7.3	Perkerasan
621.7.4	Pasangan
621.8	Dacrah samping
621.8.1	Tanaman
621.8.2	Pagar
621.9	Bangunan pelengkap dan pengaman
621.9.1	Rambu-rambu/ tanda-tanda lalu lintas
621.9.2	Lampu Pencerangan
621.9.3	Lampu pengaturan Lalu Lintas
621.9.4	Patok-patok KM
621.9.5	Patok-patok R.O.W. (Sempadan)
621.9.6	Rel pengaman
621.9.7	Pagar
621.9.8	Turap Penahan
621.9.9	Bronjong
622	Jalan Provinsi
622.1	Dacrah Penguasaan
622.1.1	Tanah
622.1.2	Tanaman
622.1.3	Bangunan
622.1.4	Jalan sementara
622.1.5	Jembatan sementara
622.1.6	Kantor/Gedung proyek
622.1.7	Barak kerja
622.1.8	Laboratorium lapangan
622.1.9	Rumah
622.2	Badan Jalan
622.2.1	Pekerjaan Tanah (<i>earth work</i>)
622.2.2	Stabilisasi
622.3	Perkerasan (<i>Pavement</i>)
622.3.1	Lapis Pondasi bawah
622.3.2	Lapis Pondasi
622.3.3	Lapis Permukaan

622.4	<i>Drainase</i>
622.4.1	Parit
622.4.2	Gorong-gorong (<i>culvert</i>)
622.4.3	Buku Trotoir
622.4.4	Tanah
622.4.5	Perkerasan
622.5	Trotoir
622.5.1	Tanah
622.5.2	Perkerasan
522.6	Medium
522.6.1	Tanah
522.6.2	Tanaman
622.6.3	Perkerasan
622.6.4	Pasangan
622.7	Daerah Samping
622.7.1	Tanaman
622.7.2	Pagar
622.8	Bangunan Perlengkapan dan pengaman
622.8.1	Rambu-rambu
622.8.2	Lampu penerangan
622.8.3	Lampu Pengatur Lalu lintas
622.8.4	Patok-patok KM
622.8.5	Patok-patok R.O.W (Sempadan)
622.8.6	Rel Pengaman
622.8.7	Pagar
622.8.8	Turap Penahan
622.8.9	Bronjong
623	Jalan Nasional
623.1	Daerah Penguasaan
623.2	Badan Jalan
623.3	Perkerasan (Lapisan Pondasi, Lapisan Permukaan)
623.4	Drainase (gorong-gorong, parit)
623.5	Median
623.6	Daerah samping (pagar, tanaman)
623.7	Bangunan pelengkap dan bangunan pengaman (rambu-rambu)
624	-
625	-
626	-
627	-
628	-
629	-
630	JEMBATAN
631	Jembatan pada jalan kota
631.1	Daerah penguasaan
631.1.1	Tanah
631.1.2	Tanaman
631.1.3	Bangunan
631.2	Bangunan Sementara
631.2.1	Jalan Sementara
631.2.2	Jembatan Sementara
631.2.3	Kantor Proyek

631.2.4	Gedung Proyek
631.2.5	Barak Kerja
631.2.6	Laboratorium Lapangan
631.2.7	Rumah
631.3	Pekerjaan Tanah (<i>earth work</i>)
631.3.1	Galian tanah
631.3.2	Timbunan Tanah
631.4	Pondasi
631.4.1	Pondasi Kepala Bangunan
631.4.2	Pondasi Pilar
631.4.3	Pondasi Angker
631.5	Bangunan Bawah
631.5.1	Kepala Jembatan
631.5.2	Pilar
631.5.3	Piloon
631.5.4	Landasan
631.6	Bangunan
631.6.1	Gelagar
631.6.2	Lantai
631.6.3	Perkerasan
631.6.4	Jalan orang/trotoar
631.6.5	Sandaran
631.6.6	Talang air
631.7	Bangunan pengamanan
631.7.1	Turap/penahan
631.7.2	Bronjong
631.7.3	<i>Strok Darn</i>
631.7.4	<i>Kist Darn</i>
631.7.5	<i>Coupute</i>
631.7.6	Krip
631.8	Bangunan Pelengkap
631.8.1	Rambu-rambu/ tanda-tanda lalu lintas
631.8.2	Patok pengamanan
631.8.3	Patok R.O.W. (Sempadan)
631.9	Oprit
631.9.1	Badan
631.9.2	Perkerasan
631.9.3	Drainage
631.9.4	Baku
631.9.5	Mediun
632	Jembatan pada jalan Luar Kota
632.1	Daerah Penguasaan
632.1.1	Tanah
632.1.2	Tanaman
632.1.3	Bangunan
632.2	Bangunan Sementara
632.2.1	Jalan sementara
632.2.2	Jembatan sementara
632.2.3	Kantor Proyek
632.2.4	Gedung Proyek
632.2.5	Barak kerja
632.2.6	Laboratorium Lapangan

632.2.7	Rumah
632.3	Pekerjaan Tanah (<i>earth work</i>)
632.3.1	Galian tanah
632.3.2	Timbunan Tanah
632.4	Pondasi
632.4.1	Pondasi Kepala Jembatan
632.4.2	Pondasi Pilar
632.4.3	Pondasi angker
632.5	Bangunan Bawah
632.5.1	Kepala Jembatan
632.5.2	Pilar
632.5.3	Piloon
632.5.4	Landasan
632.6	Bangunan atas
632.6.1	Gelagar
632.6.2	Lantai
632.6.3	Perkerasan
632.6.4	Jalan orang/ <i>trottoar</i>
632.6.5	Sandaran
632.6.6	Talang air
632.7	Bangunan Pengaman
632.7.1	Turap / penahan
632.7.2	Bronjong
632.7.3	<i>Strek Dam</i>
632.7.4	<i>Kist Dam</i>
632.7.5	<i>Coupute</i>
632.7.6	Kriup
632.8	Bangunan pelengkap
632.8.1	Rambu-rambu/ tanda-tanda lalu lintas
632.8.2	Patok Pengaman
632.8.3	Patok R.O.W. (Sempadan)
632.9	Oprit
632.9.1	Badan
632.9.2	Perkerasan
632.9.3	<i>Drainase</i>
632.9.4	Baku
632.9.5	Medium
633	<i>Jembatan pada jalan Nasional</i>
633.1	Daerah penguasaan (Tanaman, Tanah, Bangunan), Bangunan Sementara (gudang Proyek, kantor proyek)
633.2	
633.3	Pondasi
633.4	Bangunan Bawah
633.5	Bangunan (gelagar, lantai, sandaran, perkerasan)
633.6	Bangunan Pengamanan (<i>Bronjong strek dam, krib</i>)
633.7	Bangunan pelengkap dan pengaman (rambu-rambu)
634	-
635	-
636	-
637	-
638	-

639	
640	BANGUNAN
641	Bangunan Pemerintah
641.1	Gedung Pengadilan
641.2	Rumah Pejabat Negara
641.3	Gedung DPR
641.4	Gedung Balai kota
641.5	Penjara
641.6	Perkantoran
642	Bangunan pendidikan
642.1	Taman Kanak-kanak
642.2	SD dan Sekolah menengah
642.3	Perguruan tinggi
643	Bangunan rekreasi
643.1	Bangunan olahraga
643.2	Gedung kesenian
643.3	Gedung Pemacar
644	Bangunan Perdagangan
644.1	Pusat perbelanjaan
644.2	Gedung Perdagangan
644.3	Bank
644.4	Perkantoran
645	Mandi, Cuci, Kakus (MCK) umum
645.1	Gedung Parkir
645.2	Rumah Sakit
645.3	Gedung Telkom
645.4	Terminal angkutan Udara
645.6	Terminal angkutan Air
645.7	Terminal angkutan darat
645.8	Bangunan Keagamaan
646	Bangunan Peninggalan Sejarah
646.1	Monumen
646.2	Candi
646.3	Kraton
646.4	Rumah Tradisional
647	Bangunan Industri
648	Bangunan tempat tinggal
648.1	Rumah perkantoran
648.1.1	Inti / sederhana
648.1.2	Sedang / mewah
648.2	Rumah pedesaan
648.2.1	Rumah Contoh
648.3	<i>Real Estate</i>
649	Elemen Bangunan
649.1	Pondasi
649.1.1	Diatas Tiang
649.2	Dinding
649.2.1	Penahan Beban
649.2.2	Tidak menahan Beban
629.3	Atap
649.4	Lantai/langit-langit
639.4.1	<i>Suspendend</i>

649.4.2	Solit
649.5	Pintu / Jendela
649.5.1	Pintu Hermonik
649.5.2	Pintu Biasa
649.5.3	Pintu sorong
649.5.4	Jendela kayu
649.5.5	Jendela sorong
649.5.6	Jendela Vertikal
650	TATA RUANG KOTA
651	Daerah Perdagangan / Pelabuhan
651.1	Daerah Pusat Perbelanjaan
651.2	Daerah Perkantoran
652	Daerah Pemerintahan
653	Daerah Perumahan (Site & Serve)
653.1	Kepadatan Rendah (<i>Low Density</i>)
653.2	Kepadatan tinggi (<i>High Density</i>)
654	Daerah industri
654.1	Industri Berat
654.2	Indusrti ringan
654.3	Industri Rumah (<i>home industri</i>)
655	Daerah Rekreasi (<i>open Spece</i>)
655.1	Publik Garden
655.2	<i>Sport & Playing fields</i>
655.3	<i>Open space</i>
656	Transportasi (tata letak)
656.1	Jaringan Jalan
656.1.1	Penerangan Jalan
656.2	Jaringan Kereta Api
656.3	Jaringan Sungai
657	<i>Assineering</i>
657.1	Saluran pengumpulan
657.2	Instansi pengolahan
657.2.1	Bangunan
657.2.2	Bangunan Penyaring
657.2.3	Bangunan Penghancur kotoran
657.2.4	Bangunan Pengendapan
657.2.5	Bangunan Pengering Lumpur
657.2.6	Unit Disinfektan
657.2.7	Unit Perpompaan
658	Kesehatan Lingkungan
658.1	Persampahan
658.1.1	Bangunan Pengumpul
658.1.2	Bangunan Pemusnahan
658.2	Pengotoran Udara
658.3	Pengotoran Air
658.3.1	Air Buangan Industri
658.4	Kegaduhan
658.5	Kebersihan Kota
659	-
660	TATA LINGKUNGAN

660.1	Lingkungan Hidup
660.2	Kebersihan Lingkungan
660.3	Pencemaran
660.3.1	Pencemaran Air
660.3.2	Pencemaran Tanah
660.3.3	Pencemaran Udara
660.3.4	Pencemaran Limbah Padat dan Bahan Berbahaya Beracun (B3)
661	Kerusakan Lingkungan
661.1	Konservasi Pesisir dan Laut
661.2	Konservasi Sumber daya alam
662	Pentaatan Hukum Lingkungan
663	Laboratorium Lingkungan
663.1	Air
663.2	Udara
663.3	Tanah
664	Analisis Dampak Lingkungan
665	Pengembangan Teknologi Lingkungan
666	Pengembangan Kapasitas
667	Pengamanan Lingkungan
668	-
669	-
670	KETENAGAAN
670.1	Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)
671	Listrik
671.1	Kelistrikan
671.1.1	Kelistrikan PLN
671.1.2	Kelistrikan non PLN
671.2	Pembangkit Tenaga Listrik
671.2.1	PLTA – Pembangkit Listrik Tenaga Air
671.2.2	PLTD – Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
671.2.3	PLTG – Pembangkit Listrik Tenaga Gas
671.2.4	PLTM – Pembangkit Listrik Tenaga Matahari
671.2.5	PLTN – Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
671.2.6	PLTN – Pembangkit Listrik Tenaga panas Bumi
671.2.7	PLTU – pembangkit listrik Tenaga Uap
671.3	Transmisi Tenaga listrik
671.3.1	Gardu Induk / Gardu penghubung / Gardu Trafo
671.3.2	Saluran Udara Tenaga Tinggi
671.3.3	Kabel Bawah Tanah
671.4	Distribusi Tenaga Listrik
671.4.1	Gardu Distribusi
671.4.2	Tegangan Menengah
671.4.3	Tegangan Rendah
671.4.4	Jaringan Bawah Tanah
671.5	Pengusahaan Listrik
671.5.1	Sumbangan Listrik
671.5.2	Penjualan Tenaga Listrik
671.5.3	Tarif Listrik
672	Tenaga Air
673	Tenaga Minyak
674	Tenaga Gas

675	Tenaga Matahari
676	Tenaga Nuklir
677	Tenaga Panas Bumi
678	Tenaga Uap
679	Tenaga Lainnya
680	PERALATAN PEKERJAAN UMUM
681	-
682	-
683	-
684	-
685	-
686	-
687	-
688	-
689	-
690	AIR MINUM
691	Intako
691.1	<i>Bromicaptering</i>
691.2	Sumur
691.3	Bendungan
691.4	Saringan (<i>Screen</i>)
691.5	Pintu air
691.6	Saluran Pembawa
691.7	Alat Ukur
691.8	Perpompaan
692	Transmisi Air Baku
692.1	Perpipaan
692.2	Katup Udara (<i>Air Relief</i>)
692.3	Tutup Penguras (<i>Blow off</i>)
692.4	Bak Pelepas Tekanan
692.5	Jembatan Pipa
692.6	<i>Syphon</i>
693	Instalasi Pengelolaan
693.1	Bangunan Ukur
693.2	Bangunan Aerasi
693.3	Bangunan Pengendapan
693.4	Bangunan Pembuluh Bahan Kimia
693.5	Bangunan Pengaduk
693.6	Bangunan Saringan
693.7	Perpompaan
693.8	<i>Clear Hell</i>
694	Distribusi
694.1	Reservoir menara bawah tanah
694.1.1	Menara
694.1.2	Reservior dibawah tanah
694.2	Perpipaan
694.3	Pempompaan
694.4	Jembatan pipa
694.5	<i>Syphon</i>

694.6	<i>Hydran</i>
694.6.1	<i>Hydran Umum</i>
694.6.2	<i>Hydran Kebakaran</i>
694.7	Katup
694.7.1	Katup Udara (<i>air relief</i>)
694.7.2	Katup Pelepas (<i>blow off</i>)
694.8	Bak pelpas tekanan (<i>pressuer reducing valve</i>)
695	-
696	-
697	-
698	-
699	-
700	PENGAWASAN
700.1	Kebijakan dan Program pengawasan
700.2	Pengawasan perencanaan pengadaan/ Proyek
701	Pengawasan Inventarisasi asset
702	Pengawasan organisasi dan tata laksana
703	Pengawasan Perpustakaan dan Dokumen
704	Pengawasan Penelitian/ Riset
705	Pengawasan Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Teknologi
706	Pengawasan Pertahanan/BPN
707	Pengawasa Konferensi/Rapat Dinas
708	-
709	-
710	BIDANG PEMERINTAHAN
711	Pengawasan Pemerintahan Provinsi
712	Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota
713.1	Pengawasan APIP kabupaten
713.1.1	Koordinasi dan konsultasi pengawasan
713.1.2	Penggilan
713.1.3	Perintah Tugas
713.1.4	PKS (Pelatihan Dikantor sendiri)/ BinteK
713.1.5	Pemeriksaan Klasifikasikan disini pemeriksaan berkala sesuai PKPT, pemeriksaan dan penanganan kasuk/khusus, pemeriksaan non PKPT lainnya
713.1.6	Evaluasi
713.1.7	Monitoring
713.1.8	<i>Review</i>
713.1.9	Pelaporan Pengawasan
713.1.9.1	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Klasifikasikan disini LHP berkala, Kasus, Khusus dan Non PKPT Lainnya
713.1.9.2	Laporan hasil Evaluasi (LHE)
713.1.9.3	Laporan Hasil <i>Review</i> (LHR)
713.2.0	Pengawasan Pembinaan
713.2.1	Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor
713	Pengawasan pemerintahan Desa
714	-
715	-

716	-
717	-
718	-
719	-
720	BIDANG POLITIK
721	Pengawasan Partai
721.1	Keanggotaan
721.2	Pendirian/Pembubaran
721.3	Pelanggaran pemasangan atribut Partai
722	Pengawasan Pembinaan Ipoleksosbud Hankam
723	Pengawasan organisasi meliputi organisasi kemasyarakatan, profesi, wanita, buruh/tani, dan kepemudaan
724	Pengawasan Kepercayaan terhadap Tuhan YME
725	-
726	-
727	-
728	-
729	-
730	BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN
731	Pengawasan Kesbangpolinmas
732	Pengawasan SAR/ Bencana
733	Pengawasan Keamanan
734	Pengawasan Perlindungan Masyarakat
735	Pengawasan Bencana Alam
736	Pengawasan Lingkungan Hidup
737	-
738	-
739	-
740	BIDANG KESRA
741	Pengawasan Pembangunan Desa
742	Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan
742.1	Kesejahteraan Guru
742.2	Fasilitas/Sarana
742.3	Mutu Pendidikan
743	Pengawasan Pendidikan
743.1	kebudayaan Daerah/Nasional
743.2	Kebudayaan Asing
744	Pengawasan Kesehatan/Makanan/Obat
745	Pengawasan SARA (Suku Agama Ras)
746	Pengawasan Kesejahteraan Sosial
747	Pengawasan Kependudukan Migrasi / Urbanisasi
748	Pengawasan Kehumasan / Media Massa
749	Pengawasan Bantuan/Subsidi Masyarakat
750	BIDANG PEREKONOMIAN
751	Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian
752	Pengawasan pertanian dan Perkebunan
753	Pengawasan Kehutanan
754	Pengawasan Pertambangan/ESDM
755	Pengawasan Peternakan dan Kesehatan Hewan
756	Pengawasan Tenaga Kerja dan Ketrasmigrasian
757	Pengawasan PMDN/PMA

758	Pengawasan Perbankan/Moneter
759	Pengawasan Kelautan & Perikanan
760	BIDANG PEKERJAAN UMUM
761	Pengawasan Pengairan
762	Pengawasan Jalan
763	Pengawasan Jembatan
764	Pengawasan Bangunan
745	Pengawasan Tata Ruang Kota
766	Pengawasan Tata Lingkungan
767	Pengawasan Ketenagaaan
768	Pengawasan Peralatan
769	Pengawasan Air Minum
770	PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK
771	Penyimpangan Pejabat Publik
772	Serah Terima jabatan Bupati
773	Pemilihan Bupati
774	Laporan Gubernur
775	Laporan Bupati
776	Penolakan LPJ
777	Penyimpangan Pejabat Publik
778	Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara
779	Peradilan Tata Usaha Negara (PUTN)
780	BIDANG KEPEGAWAIAN
781	Pengawasan Pengadaan PNS
782	Pengawasan penilaian dan disiplin PNS
783	Keanggotaan PNS dalam Parpol
784	Penyimpanan Pejabat/PNS
785	Persengketaan PNS
786	Pengawasan Pemberhentian PNS
787	-
788	-
789	-
790	BIDANG KEUANGAN
791	Pengawasan Anggaran / APBD
792	Pengawasan Akuntansi
793	Pengawasan Perbendaharaan
794	Pengawasan Pengelolaan Kas Daerah
795	Pengawasan Pendapatan / Penerimaan Pajak
796	Pengawasan Keuangan Pendidikan PNS
797	Pengawasan Otorisasi
798	Pengawasan Verifikasi
799	Pengawasan Pembukuan
800	KEPEGAWAIAN
	Klasifikasi disini : Kebijakan Kepegawaian
800.1	Perencanaan
800.2	Penelitian
800.2.1	Pengaduan
800.2.2	Team
800.2.3	Statistik
800.2.4	Peraturan Perundang-undangan
801	-
802	-

803	-
804	-
805	-
806	-
807	-
808	-
809	-
810	PENGADAAN
	Meliputi lamaran, pengujian kesehatan dan pengangkatan
	Calon
811	Lamaran
811.1	Testing
811.2	Screening
811.3	Panggilan
812	Pengujian Kesehatan
813	Pengangkatan Calon Pegawai
813.1	Pengangkatan Calon Pegawai Golongan I
813.2	Pengangkatan Calon Pegawai Golongan II
813.3	Pengangkatan Calon Pegawai Golongan III
813.4	Pengangkatan Calon Pegawai Golongan IV
814	Pengangkatan Tenaga Tidak Tetap
814.1	Pengangkatan Tenaga Bulanan
814.2	Pengangkatan Tenaga Harian
814.3	Pengangkatan Tenaga Kontrak
815	-
816	-
817	-
818	-
819	-
820	MUTASI
821	Pengangkatan
821.1	Pengangkatan CPNS menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
821.1.1	Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan I
821.1.2	Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan II
821.1.3	Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan III
821.2	Pengangkatan dalam jabatan struktural, pembebasan dari jabatan, Berita acara serah terima jabatan, pernyataan menduduki jabatan, sumpah janji
821.2.1	Eselon 1
821.2.2	Eselon 2
821.2.3	Eselon 3
821.2.4	Eselon 4
821.2	Pengangkatan dalam jabatan fungsional, pemberhentian sementara, pengangkatan kembali, pernyataan menduduki jabatan, sumpah janji
822	Kenaikan gaji berkala
822.1	PNS Golongan I
822.2	PNS Golongan II
822.3	PNS Golongan III
822.4	PNS Golongan IV
823	Kenaikan Pangkat

843.4	Keluarga Berencana
844	Koperasi / Distribusi
844.1	Distribusi pangan
844.2	Distribusi Sandang
844.3	Distribusi Lainnya
845	Perumahan PNS
846	Dispensasi
847	Rekreasi
848	-
849	-
850	CUTI
851	Cuti Tahunan
852	Cuti Besar
853	Cuti Sakit
854	Cuti Hamil/Bersalin
855	Cuti Karena Alasan Penting
856	Cuti Diluar Tanggungan Negara
857	Cuti Naik Haji
858	-
859	-
860	PENILAIAN
861	Penghargaan
861.1	Bintang / Satyalencana
861.2	Kenaikan pangkat anumerta
861.3	Kenaikat gaji istimewa
861.4	Hadiah berupa pangkat
861.5	Pegawai Teladan
862	Hukuman
862.1	Tegoran / peringatan
862.2	Penundaan kenaikan gaji
862.3	Penurunan Pangkat
862.4	Pemindahan
863	<i>Konduite</i>
864	Ujian Dinas
864.1	Tingkat I
864.2	Tingkat II
864.3	Tingkat III
865	Penilaian Kehidupan Pegawai Negeri
866	Rehabilitasi
867	-
868	-
869	-
870	TATA USAHA KEPEGAWAIAN
871	Formasi
872	<i>Bazetting</i>
873	Registrasi
873.1	NIP
873.2	KARPEG
873.3	Legitimasi/ tanda pengenal
873.4	Daftar Keluarga
873.5	KARSU/KARIS

874	Daftar Riwayat Pekerjaan
874.1	Tanggal Lahir
874.2	Penggantian nama
874.3	Kepartaian / organisasi
875	Kewenangan mutasi kepegawaian
875.1	Pelimpahan Wewenang
875.2	Spesimen tanda tangan
876	Penggajian
876.1	SKPP
877	Sumpah / Janji
878	Korps Kepegawaian
979	-
880	PEMBERHENTIAN
881	Pemintaan Sendiri
882	Dengan hak Pensiun
882.1	Pemberhentian dengan hak pensiun Peg. Neg. Gol I
882.2	Pemberhentian dengan hak pensiun Peg. Neg. Gol II
882.3	Pemberhentian dengan hak pensiun Peg. Neg. Gol III
882.4	Pemberhentian dengan hak pensiun Peg. Neg. Gol IV
882.5	Pensiun janda / duda
882.6	Pensiun yatim piatu
882.7	Uang Muka Pensiun
883	Karena Meninggal
883.1	Karena Meninggal dalam tugas
884	Alasan lain
885	Uang pesangon
886	Uang tunggu
887	Sementara waktu
888	Tidak dengan hormat
889	Pegawai tidak tetap
890	PENDIDIKAN PEGAWAI
891	Perencanaan
892	Pendidikan Reguler
892.1	
892.2	Diploma
892.2.1	Diploma I
892.2.2	Diploma II
892.2.3	Diploma III
892.2.4	Diploma IV
892.3	Sarjana (S1)
892.4	Pasca Sarjana (S2)
892.5	Doktor (S3)
892.6	Kursus-kursus reguler
893	Pendidikan Non Reguler
893.1	Diklat Struktural
893.1.1	Diklat Pimpinan IV
893.1.2	Diklat Pimpinan III
893.1.3	Diklat Pimpinan II
893.1.4	Diklat Pimpinan I
893.2	Diklat Fungsional
893.3	Kursus-kursus Penataran

894	Pengembangan Pegawai
894.1	Tugas Belajar
894.2	Izin Belajar
894.3	Tunjangan Belajar
894.4	Bantuan Pendidikan
894.5	Penempatan kembali
895	Metode
895.1	Kuliah
895.2	Ceramah, <i>symposium</i>
895.3	Diskusi
	Kuliah Lapangan, Widya wisata,
895.4	KKN
895.5	Kurikulum
895.6	Karya Tulis
896	Tenaga Pengajar
897	Administrasi Pendidikan
898	Fasilitas Pendidikan
899	Sarana Pendidikan
899.1	Buku
899.2	Gedung
900	KEUANGAN
901	Nota Keuangan
902	APBN
903	APBD
904	-
905	-
906	-
907	-
908	-
909	-
910	ANGGARAN
911	Keputusan tentang penunjukkan pengelola keuangan SKPD/PPKD
912	Keputusan Gubernur tentang penunjukkan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD
913	DPA/PPA/DPAL-SKPD/PPKD
914	Anggaran Kas
915	Surat Penyediaan Dana
916	-
917	-
918	-
919	-
920	AKUNTANSI
	Laporan - laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
921	-
922	-
923	-
924	-
925	-
926	-
927	-
928	-

929	-
930	PERBENDAHARAAN
931	Surat perintah pencairan Dana (SP2D)
932	Surat Penolakan Penerbitan SP2D
933	Daftar Penguji SP2D
934	-
935	-
936	-
937	-
938	-
939	-
940	PEMBINAAN KEBENDAHARAAN
941	Bimtek-bimtek/kursus yang berkaitan dengan keuangan
942	-
943	-
944	-
945	-
946	-
947	-
948	-
949	-
950	PENGELOLAAN KAS DAERAH
951	Laporan pemotongan IWP, Taperum, PPh 21 dari gaji
952	Laporan Rekaitulasi penerimaan daerah
953	Daftar pemotongan dan Penyetoran pajak (PPN/PPh) dari CV/PT/Instansi
954	Surat tanda Setoran (STS)
955	Laporan Realisasi Daerah
955.1	Laporan Realisasi Penerimaan Daerah
955.2	Laporan Realisasi Pengeluaran Daerah
956	Rekonsiliasi
956.1	Surat Rekonsiliasi Penerimaan
951.2	Laporan Rekonsiliasi Bank
957	Laporan Mutasi Penempatan Deposito
958	Surat Perintah Transfer Uang (SPTU)
959	-
960	EVALUASI DAN PENGENDALIAN
961	Tuntutan Ganti Rugi
962	Tuntutan Perbendaharaan
963	Evaluasi dan perubahan APBD Kabupaten / Kota
964	Evaluasi dan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten / Kota
965	Edaran-edaran
966	-
967	-
968	-
969	-
970	PENDAPATAN
971	Perimbangan Keuangan
971.1	Bagi hasil pajak

971.1.1	Pajak Bumi Bangunan (PBB)
971.1.2	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBHTB)
971.1.3	Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH Pasal 21)
971.2	Bagi Hasil Bukan Pajak
971.2.1	Pemberian Hak Atas Tanah Pemerintah
971.2.2	Provisi Sumber Daya Hutan
971.2.3	Sumber Daya Alam/Migas
971.2.4	Iuran Eksplorasi/Landrent
972	Subsidi
973	Pajak
973.1	Pajak kendaraan bermotor
973.2	Bea kendaraan diatas air
973.3	Bea balik Nama kendaraan bermotor
973.4	Bea balik Nama kendaraan diatas air
973.5	Pajak bahan kendaraan bermotor
973.6	Pajak pengembalian dan pemanfaatan ABT
973.7	Pajak Pengambilan dan pemanfaatan AP
974	Retribusi
974.1	Retribusi pelayanan kesehatan
974.2	Retribusi pemakaian kekayaan daerah
974.3	Retribusi tempat pelelangan ikan
974.4	Retribusi tempat penginapan / pesanggrahan/villa
974.5	Retribusi penjualan produksi usaha daerah
974.6	Retribusi Hasil Hukum
974.6.1	Pengendalian lalu lintas kabupaten/kota
974.6.2	Ijin pemanfaatan flora dan fauna
974.6.3	Tempat pelelangan hasil hutan
974.7	Retribusi ijin pengambilan dan pemanfaatan ABT/AP
974.8	Retribusi bidang metrologi
974.9	Retribusi penyelenggaraan perhubungan
974.9.1	Ijin trayek
974.9.2	Penyelenggaraan telkom
974.9.3	Dispensasi kelebihan muatan
975	Bea
976	Cukai
977	Pungutan
978	Bantuan
978.1	Bantuan Presiden
978.2	Bantuan menteri
978.3	Bantuan Gubernur
978.4	Bantuan Bupati
978.5	Bantuan Lainnya
979	Pendapatan Lainnya
979.1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
979.1.1	Pelepas Hak atas Tanah
979.1.2	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
979.1.3	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
979.1.4	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
979.1.5	Penjualan Bongkaran Bangunan dan Inventaris
979.1.6	Penjualan Drum Besar
979.1.7	Penjualan Hasil Penebangan Pohon
979.2	Penerimaan Jasa Giro

979.2.1	Jasa Giro Kas Daerah
979.2.2	JasaGiro Pemegang Kas
979.2.3	Jasa Giro Khusus
979.3	Penerimaan Bunga Bank
979.3.1	Bunga Deposito
979.3.2	Bunga Tabungan
979.4	Penerimaan Ganti Rugi atas Kerugian /Kekayaan Daerah (TP-TGR)
979.4.1	Sumbangan Pihak ke tiga
979.4.2	Sumbangan Pihak ke tiga Kendaraan (Dealer)
979.4.3	Sumbangan Pihak ke tiga Kayu
979.5	Penerimaan Lain-lain
979.5.1	Penerimaan Kembali Kredit BKK
979.5.2	Ternak Tidak Layak Bibit
979.5.3	Sewa Intenet
979.5.4	Penerimaan dari Dana Bergulir/ <i>Revolving</i>
979.5.5	Kerjasama dengan BUMIDA
979.5.6	Penerimaan DUKS
979.5.7	Tempat Rekreasi Nusakambangan
979.5.8	Setoran TP-TGR
979.5.9	Penerimaan Lainnya dari Setda/ Dinas-Dinas
980	PENGELUARAN
981	-
982	-
983	-
984	-
985	-
986	-
987	-
988	-
989	-
990	BENDAHARAWAN
991	SKPP
992	Tegoran SPJ
993	-
994	-
995	-
996	-
997	-
998	-
999	-

BUPATI BARITO UTARA,

 NADALSYAH